



RENCANA STRATEGIS

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JLN. SYECH NAWAWI ALBANTANI (KP3B) KOTA SERANG**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 telah dapat tersusun. Pada prinsipnya dokumen ini merupakan rencana pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk 4 (empat) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026.

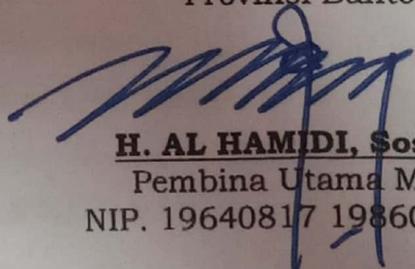
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 secara keseluruhan terdiri dari 8 (delapan) bagian pembahasan yang meliputi : Bab I Pendahuluan (Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan), Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), sumber daya yang dimiliki, capaian yang telah dihasilkan dan tantangan yang masih dihadapi serta perlu diatasi melalui Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten), Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Telaahan Renstra Kementarian/Lembaga dan Visi, Misi, Program serta Kegiatan berdasarkan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Bab IV Tujuan dan Sasaran (Memuat tentang tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Banten), Bab V Strategi dan Kebijakan (Memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten) Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan (Memuat tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selama 4 (empat) Tahun ke depan, Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan (Memuat tentang indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-3026), Bab VIII Penutup (Memuat tentang pentingnya Renstra bagi pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Banten dalam empat tahun kedepan).

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Maret 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten



H. AL HAMIDI, Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640817 198603 1 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Landsan Hukum	5
1.4. Maksud dan Tujuan	9
1.5. Sistematikan Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	61
3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD	65
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	69
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	71
3.5. Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah	72
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan	75
4.2. Sasaran	76

BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1.	Strategi	79
5.2.	Arah Kebijakan	80
5.3.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	85
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN	
6.1.	Program dan Kegiatan	90
6.2.	Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	108
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
7.1.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	158
7.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	161
BAB VII	PENUTUP	
8.1.	Penutup	178
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah dan Status Pegawai	17
Tabel 2.2	Jumlah dan Status Pegawai Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan	19
Tabel 2.4	Pencapaian Pelayanan Kinerja	22
Tabel 2.5	Pencapaian Anggaran	28
Tabel 2.6	Data Pelatihan di UPTD Latihan Kerja Tahun 2017-2021	30
Tabel 2.7	Data Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2017-2021	32
Tabel 2.8	Data Pemagangan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021	34
Tabel 2.9	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Tahun 2017-2022	36
Tabel 2.10	Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Tahun 2017-2021	39
Tabel 2.11	Data Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun 2016-2021	42
Tabel 2.12	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2017-2022	45
Tabel 2.13	Jumlah Perusahaan di Banten Tahun 2019-2022	48
Tabel 2.14	Jumlah Pengawasan Ketenagakerjaan Ke Perusahaan Tahun 2017-2022	50
Tabel 2.15	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan SMK3 Tahun 2019-2021	53
Tabel 2.16	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Penanganan Upah Tahun 2017-2021	56
Tabel 2.17	Daftar UMP dan UMK Tahun 2017-2022	58
Tabel 3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021	64
Tabel 3.2	Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 – 2024	70
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023-2026	77
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah	

	Kebijakan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023-2026	83
Tabel 5.2	Matriks Analisis SWOT	88
Tabel 6.1	Indikasi Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten	95
Tabel 6.2	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan	110
Tabel 7.1	Aspek dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	160
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	164
Tabel 7.3	Target Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)	166
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Program (Outcome)	168
Tabel 7.5	Target Berdasarkan Indikator Kinerja Program (Outcome)	174
Tabel 7.6	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penjabaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten	14
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPTD Latihan Kerja	14
Gambar 2.3	Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon	15
Gambar 2.4	Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kab. Serang, Kab. Pandeglang dan kab. Lebak	15
Gambar 2.5	Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	15
Gambar 2.6	Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangsel	16
Gambar 3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten Tahun 2017-2021	63

LAMPIRAN

- Lampiran I Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meda Indikator dan Definisi Operasional
- Lampiran II Pohon Masalah Perangkat Daerah
- Lampiran III Pohon Kinerja Perangkat Daerah
- Lampiran IV Proses Bisnis Perangkat Daerah
- Lampiran V Cascading Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diketahui, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak secara nasional tahun 2024. Selanjutnya dikeluarkan pula Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 050/3499/SJ Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2020-2024 dimana penyelarasan target indikator makro dan penyelarasan

program prioritas RPJMN yang perlu diakomodir didalam indikator daerah pada dokumen perencanaan menengah daerah yang sedang disusun.

Memperhatikan kondisi tersebut Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022 dimana Pemerintah Provinsi Banten sebagai salah satu Provinsi yang diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Selanjutnya dokumen perencanaan jangka menengah ini akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil pemilukada serentak tahun 2024 dan terbitnya RPJMD baru. Selain hal tersebut diatur pula bahwa setiap perangkat daerah setelah adanya RPD 2023-2026 ini diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023-2026 yang selanjutnya kedua dokumen ini akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Sejalan dengan amanat aturan perundang-undangan diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai unsur Perangkat Daerah di Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023- 2026 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mendatang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 tersebut merupakan Rencana Pembangunan 4 (empat) Tahun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu tahun 2023 - 2026.

Pada akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan empat tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 RUANG LINGKUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan, Unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai empat tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai

tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Penjabaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Penyusunan Rencana Strategis OPD Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Di dalam penyusunan Rencana Strategis, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2023-2026.

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Intruksi Menteri Dalam negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2020;
21. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dan ditetapkan dimaksudkan untuk dapat memberikan arahan bagi penyelenggaraan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai pengganti Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang telah selesai periodesasinya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Banten;
2. Menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Banten selama 4 (empat) tahun mendatang sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat terwujud;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
4. Menjamin konsistensi penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di

bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Banten selama kurun waktu 2023-2026;

5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi dan Misi RPJPD, Telaahan Renstra Kementarian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang Strategi dan Kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini memuat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome).

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang pentingnya Renstra bagi pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Banten dalam empat tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

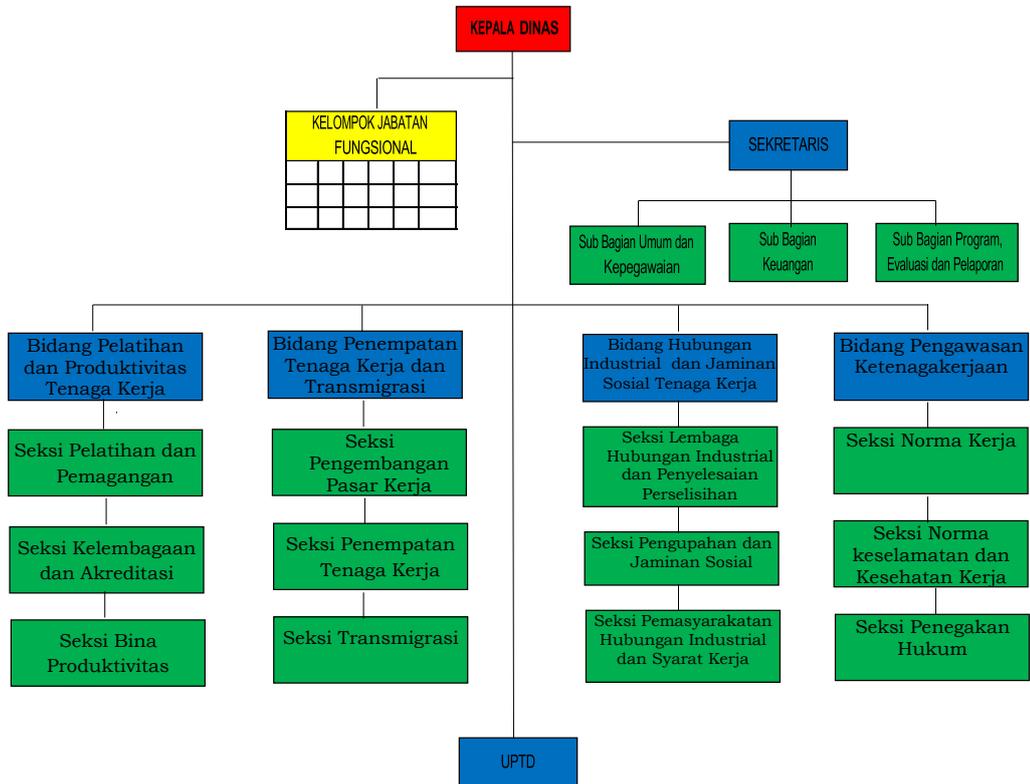
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka mempunyai struktur kelembagaan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Akreditasi;
 - c. Seksi Bina Produktivitas.
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Pasar Kerja;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Transmigrasi.

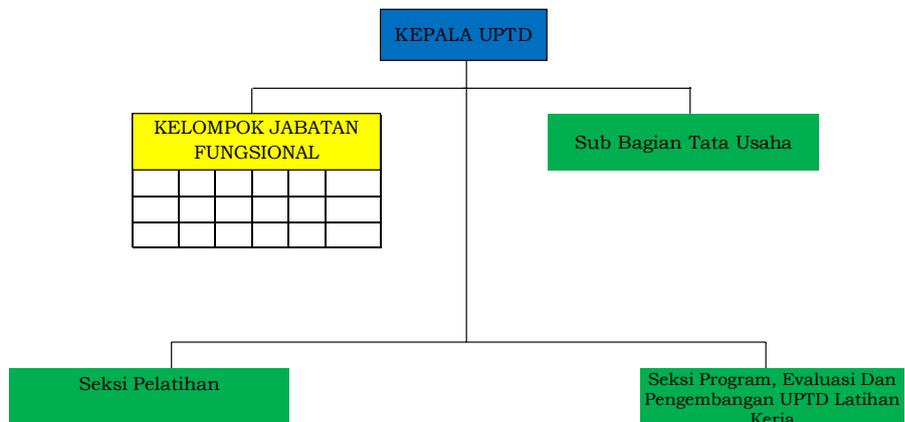
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - c. Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Seksi Norma Kerja;
 - b. Seksi Norma keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Latihan Kerja terdiri dari :
 - a. Sub.bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program, Evaluasi Dan Pengembangan UPTD Latihan Kerja;
 - c. Seksi Pelatihan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Kab. Tangerang terdiri dari :
 - Sub.Bagian Tata Usaha
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan terdiri dari :
 - Sub.Bagian Tata Usaha
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon terdiri dari :
 - Sub.Bagian Tata Usaha
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak terdiri dari :
 - Sub.Bagian Tata Usaha
12. Jabatan Fungsional ter diri dari :
 - a. Fungsional Pengawas;
 - b. Fungsional Instruktur;

- c. Fungsional Pengantar Kerja;
- d. Mediator

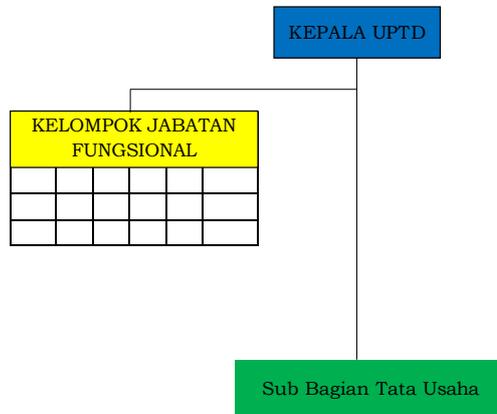
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten



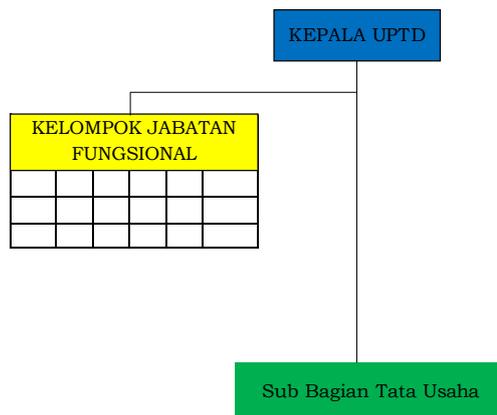
Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPTD Latihan Kerja



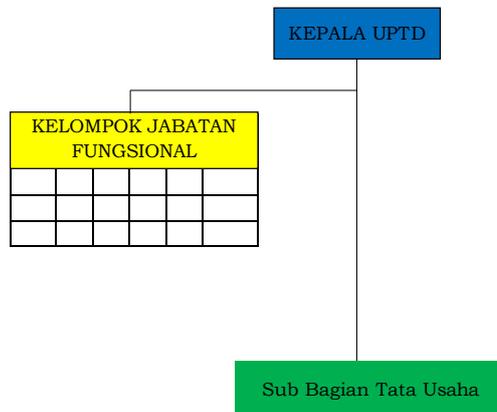
Gambar 2.3
Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota
Serang dan Kota Cilegon



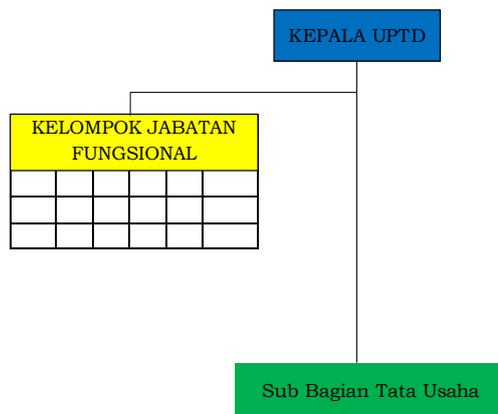
Gambar 2.4
Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten
Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak



Gambar 2.5
Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Kabupaten Tangerang



Gambar 2.6
Struktur Organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing - masing. Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Sampai dengan bulan Desember 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten memiliki Pegawai sebanyak 278 Orang yang terdiri dari 167 Orang PNS dan 111 Orang Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Status Pegawai
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	167 Orang
-	Pembina Utama Madya (IV/c)	1 Orang
-	Pembina Utama Muda (IV/c)	2 Orang
-	Pembina Tk.1 (IV/b)	7 Orang
-	Pembina (IV/a)	26 Orang
-	Penata Tk.I (III/d)	40 Orang
-	Penata (III/c)	45 Orang
-	Penata Muda Tk.I (III/b)	32 Orang
-	Penata Muda (III/a)	2 Orang
-	Pengatur Tk.I (II/d)	2 Orang
-	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	9 Orang
-	Juru Muda (I/b)	1 Orang
2	Pegawai Non ASN	111 Orang
-	Tenaga Administrasi	77 Orang
-	Tenaga Administrasi dan arsip	12 Orang
-	Tenaga Keamanan/Pengamanan Kantor	9 Orang
-	Tenaga Kebersihan/Pramubakti	6 Orang
-	Driver/ Pengemudi	3 Orang
-	Tugas Pelayanan Umum/ Petugas Kebun	4 Orang
	TOTAL	278 Orang

Sumber : Disnakertrans Prov. Banten, Desember 2021

Adapun komposisi Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah dan Status Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	167 orang
-	Pasca Sarjana (S2)	63 Orang
-	Sarjana (S1)	90 Orang
-	Diploma III	4 Orang
-	SLTA	10 Orang
-	SLTP	-
2.	Non ASN	111 Orang
-	Pasca sarjana (S2)	1 Orang
-	Sarjana (S1)	50 Orang
-	Diploma III	4 Orang
-	SLTA	52 Orang
-	SLTP	3 orang
-	SD	1 Orang
	Jumlah	278 Orang

Sumber : Disnakertrans Prov. Banten, Desember 2021

Adapun komposisi Pegawai ASN pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

No.	Kantor	Golongan							
		I		II		III		IV	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
-	DTKT Provinsi Banten	1	0.59	11	6.58	119	71.25	36	21.55
	Jumlah	167 Orang							

Sumber : Disnakertrans Prov. Banten, Desember 2021

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah pegawai ASN dan Non ASN sebanyak 278 Orang, yang terdiri dari pegawai ASN sebanyak 167 Orang dan pegawai Non ASN sebanyak 111 Orang.

Adapun komposisi pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini di tunjukan dengan banyaknya pegawai yang memiliki bekal pendidikan Strata Satu (SI) dan Strata Dua (S2).

Sedangkan komposisi pegawai ASN berdasarkan golongan terdiri dari Golongan I sebanyak 1 Orang atau 0,59%, Golongan II sebanyak 11 Orang atau 6,58%, Golongan III sebanyak 119 Orang atau 71,25% dan Golongan IV sebanyak 36 Oang atau 21,55%.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merujuk pada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Terdapat 6 (enam) program yang dapat dievaluasi dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan;

Dalam pelaksanaan program tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (Outcome) ditetapkan berdasarkan kepada :

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) :
 - a. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD;
 - b. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).
- c. Penetapan Indikator Kinerja Program (Outcome)
 - a. Capaian Perencanaan Tenaga Kerja;
 - b. Capaian Penduduk dan Tenaga Kerja;
 - c. Capaian Pelatihan dan Kompetensi Kerja;
 - d. Capaian Produktivitas Tenaga Kerja;
 - e. Capaian Kesempatan Kerja;
 - f. Capaian Hubungan Industrial;
 - g. Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
 - h. Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - i. Capaian Kondisi Lingkungan Kerja.

2.4 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2022 sebagaimana tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Pencapaian Pelayanan Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017-2022

No	Program/Indikator Program	Sat.	Basline	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Capaian Renstra Tahun Ke -					Rasio Capaian Renstra Tahun Ke -				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																	
-	Nilai IKM	Skala	2,50	2,80	3,00	0	0	0	3,1	3,2	0	0	0	110,7 1	106,67	0	0	0,00
-	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0,00
-	Persentase kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persen	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0,00
-	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persen	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0,00
-	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0,00
-	Capaian Perencanaan Tenaga Kerja	Persen	7,10	6,95	6,76	6,51	6,22	5,92	7,60	7,25	7,25	6,95	0	109,3 5	107,25	111,3 7	111,7 4	0,00
-	Capaian Penduduk dan Tenaga Kerja	Persen	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,93	6,55	6,59	4,57	0	116,0 3	128,27	128,9 3	89,35	0,00
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja																	
-	Capaian Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Persen	1,25	1,25	1,26	1,27	1,28	1,28	2,05	3,06	4,80	2,27	0	163,4 4	242,94	377,8 6	177,5 6	0,00

-	Capaian Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	4,31	4,35	4,40	4,42	4,44	4,46	6,82	4,78	5,02	4,36	0	156,7 4	108,66	113,4 8	98,20	0,00
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi																	
-	Capaian Kesempatan Kerja	Persen	14,95	15,25	15,55	15,86	16,18	16,50	13,92	13,26	13,31	11,40	0	91,26	85,27	71,85	70,44	0,00
4.	Program Hubungan Industrial																	
-	Capaian Hubungan Industrial	Persen	2,93	3,66	4,40	5,25	6,17	7,10	3,02	3,93	3,77	2,40	0	82,59	89,32	45,75	38,90	0,00
-	Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0	100,0 0	100,00	100,0 0	100,0 0	0,00
-	Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	9,49	9,51	9,53	9,54	9,55	9,56	10,00	9,36	10,00	10,00	0	105,1 1	98,16	104,8 0	104,6 9	0,00
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan																	
-	Capaian Kondisi Lingkungan Kerja	Persen	2,92	2,98	3,04	3,10	3,10	3,13	0,93	1,18	3,35	0,90	0	31,22	38,82	108,3 1	28,87	0,00
	JUMLAH		58,06	59,06	60,06	61,06	62,06	63,06	60,27	59,38	64,09	52,84	0,00	102,0 4	98,87	86,54	85,15	0,00

Sesuai tabel 2.4 tersebut, capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten berdasarkan pelaksanaan program periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 - 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang mempunyai indikator Kinerja program :
 - a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target capaian skala 2,80 di Tahun 2018 dan target capaian skala 3,00 di Tahun 2019, realisasi indikator program mencapai 110,71 persen pada Tahun 2018 dan 106,67 persen di Tahun 2019.
 - b. Persentase Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah dengan target capaian 100 persen, realisasi indikator program mencapai 100 persen.
 - c. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah dengan target capaian 100 persen, realisasi indikator program mencapai 100 persen.
 - d. Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD dengan target capaian 100 persen, realisasi indikator program mencapai 100 persen.
 - e. Persentase Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD dengan target capaian 100 persen, realisasi indikator program mencapai 100 persen.
 - f. Capaian perencanaan tenaga kerja dengan target capaian 6,95 persen di Tahun 2018, target capaian 6,76 persen di Tahun 2019, target capaian 6,51 persen di Tahun 2020, target capaian 6,22 persen di Tahun 2021 dan target capaian 5,92 persen di Tahun 2022 dan realisasi indikator program ini 7,60 persen

atau 109,35 persen di Tahun 2018, 7,25 persen atau 107,25 persen di Tahun 2019, 7,25 persen atau 111,37 persen di Tahun 2020, 6,95 persen atau 111,74 persen di Tahun 2021.

- g. Capaian penduduk dan tenaga kerja dengan target capaian 5,11 persen di Tahun 2018, target capaian 5,11 persen di Tahun 2019, target capaian 5,11 persen di Tahun 2020, target capaian 5,11 persen di Tahun 2021 dan target capaian 5,11 persen di Tahun 2022 dan realisasi indikator program ini 5,93 persen atau 116,03 persen di Tahun 2018, 6,55 persen atau 128,27 persen di Tahun 2019, 6,59 persen atau 128,93 persen di Tahun 2020, 4,57 persen atau 89,35 persen di Tahun 2021.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang mempunyai indikator kinerja program :
- a. Capaian pelatihan dan kompetensi kerja dengan target capaian 1,25 persen di Tahun 2018, target capaian 1,26 persen di Tahun 2019, target capaian 1,27 persen di Tahun 2020, target capaian 1,28 persen di Tahun 2021 dan target capaian 1,28 persen di Tahun 2022 sedangkan realisasi indikator program ini 2,05 persen atau 163,44 persen di Tahun 2018, 3,06 persen atau 242,94 persen di Tahun 2019, 4,80 persen atau 377,86 persen di Tahun 2020, 2,27 persen atau 177,56 persen di Tahun 2021.
 - b. Capaian Produktivitas Tenaga Kerja dengan target capaian 4,35 persen di Tahun 2018, target capaian 4,40 persen di Tahun 2019. Target capaian 4,42 persen di Tahun 2020, target capaian 4,44 persen di Tahun 2021 dan target capaian 4,46 persen di Tahun 2022 sedangkan realisasi indikator program ini 6,82 persen atau 156,74 persen di Tahun 2018, 4,78 persen atau 108,66 persen di Tahun 2019, 5,02 persen atau 113,48 persen di Tahun 2020, 4,36 persen atau 98,20 persen di Tahun 2021.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang mempunyai indikator kinerja program :

- a. Capaian kesempatan kerja dengan target capaian 15,25 persen di Tahun 2018, target capaian 15,55 persen di Tahun 2019, target capaian 15,86 persen di Tahun 2020, target capaian 16,18 persen di Tahun 2021 dan target capaian 16,50 persen di Tahun 2022 sedangkan realisasi indikator program ini 13,92 persen atau 91,26 persen di Tahun 2018, 13,26 persen atau 85,27 persen di Tahun 2019, 13,31 persen atau 71,85 persen di Tahun 2020, 11,40 persen atau 70,44 persen di Tahun 2021.
4. Program Hubungan Industrial, yang mempunyai indikator kinerja program :
 - a. Capaian Hubungan Industrial dengan target capaian 3,66 persen di Tahun 2018, target capaian 4,40 persen di Tahun 2019, target capaian 5,25 persen di Tahun 2020, target capaian 6,17 persen di Tahun 2021, target capaian 7,10 persen di Tahun 2022 sedangkan realisasi indikator program ini 3,02 persen atau 82,59 persen di Tahun 2018, 3,93 persen atau 89,32 persen di Tahun 2019, 3,77 persen atau 45,75 persen di Tahun 2020, 3,77 persen atau 38,90 persen di Tahun 2021.
 - b. Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja dengan target capaian 10,00 persen di Tahun 2018, target capaian 10,00 persen di Tahun 2019, target capaian 10,00 persen di Tahun 2020, target capaian 10,00 persen di Tahun 2021 dan target capaian 10,00 persen di Tahun 2022 sedangkan realisasi indikator program ini 10,00 persen atau 100 persen di Tahun 2018, 10,00 persen atau 100 persen di Tahun 2019, 10,00 persen atau 100 persen di Tahun 2020, 10,00 persen atau 100 persen di Tahun 2021.
 - c. Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan target capaian 9,51 persen di Tahun 2018, target capaian 9,53 persen di Tahun 2019, target capaian 9,54 persen di Tahun 2020, target capaian 9,55 persen di Tahun 2021 dan target capaian 9,56 persen di Tahun 2022 sedangkan realisasi indikator program ini 10,00 persen atau 105,11 persen di Tahun 2018, 9,36 persen atau 98,16 persen di Tahun 2019, 10,00 persen atau 104,80 persen di Tahun 2020,

10,00 persen atau 104,69 persen di Tahun 2021.

5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, yang mempunyai indikator kinerja program :

- a. Capaian Kondisi Lingkungan Kerja dengan target capaian 2,98 persen di Tahun 2018, target capaian 3,04 persen di Tahun 2019, target capaian 3,10 persen di Tahun 2020, target capaian 3,10 persen di Tahun 2021 dan 3,13 persen di Tahun 2022 sedangkan realisasi indikator program ini 0,93 persen atau 31,22 persen di Tahun 2018, 1,18 persen atau 38,82 persen di Tahun 2019, 3,35 persen atau 108,31 persen di Tahun 2020, 0.90 persen atau 28,87 persen di Tahun 2021.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yaitu Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

Target Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD di Tahun 2018 nilai B, Tahun 2019 nilai BB, Tahun 2020 nilai BB, Tahun 2021 nilai A dan Tahun 2022 nilai A. Sedangkan realisasi dari Indikator Kinerja Utama ini nilai B di Tahun 2018, nilai BB di Tahun 2019, nilai BB di Tahun 2020, nilai A di Tahun 2021.

Sedangkan target Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dengan nilai 59,06 di Tahun 2018, nilai 60,06 di Tahun 2019, nilai 61,06 di Tahun 2020, nilai 62,06 di Tahun 2021 dan nilai 63,06 di Tahun 2022. Sedangkan capaian pada indikator kinerja utama ini dengan nilai 60,27 atau 102,04 persen di Tahun 2018, nilai 59,38 atau 98,87 persen di Tahun 2019, nilai 64,09 persen atau 86,54 persen di Tahun 2020, nilai 52,84 atau 85,15 persen di Tahun 2021.

Pelaksanaan program dan kegiatan akan terselenggaranya secara optimal apabila diikuti dengan sumber - sumber yang mendukung, antara lain dukungan anggaran yang sesuai dengan

target sasaran yang telah ditentukan.

Untuk pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 anggaran yang telah disediakan Pemerintah Provinsi Banten untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yaitu :

- Tahun 2017, sejumlah Rp. 97.037.430.600,-
- Tahun 2018, sejumlah Rp. 74.567.360.000,-
- Tahun 2019, sejumlah Rp. 82.166.286.000,-
- Tahun 2020, sejumlah Rp. 62.753.177.000,-
- Tahun 2021, sejumlah Rp. 66.802.549.434,-
- Tahun 2022, sejumlah Rp. 58.906.826.000,-

Secara rinci anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
Tahun 2017-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Ket.
2017	97.037.430.600	87.636.130.604	90,31	
2018	74.567.360.000	65.145.915.482	87,37	
2019	82.166.286.000	73.896.698.386	89,94	
2020	62.753.177.000	55.563.094.219	88,54	
2021	66.802.549.434	62.808.838.359	94,02	
2022	58.906.826.000	0	0	

Sumber : Disnakertrans Prov. Banten, Desember 2021

Sesuai dengan tabel 2.5 diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2017 jumlah anggaran sebesar Rp. 97.037.430.600 dan realisasi sebesar 87.636.130.604 atau 90,31%, Tahun 2018 anggaran sebesar Rp. 74.567.360.000 dan realisasi sebesar Rp. 65.145.915.482 atau 87,37%, Tahun 2019 sebesar Rp. 82.166.286.000 dan realisasi sebesar Rp. 73.896.698.386 atau 89,94%, Tahun 2020 anggaran sebesar Rp.

62.753.177.000 dan realisasi sebesar Rp. 55.563.094.219 atau 88,54%, Tahun 2021 anggaran sebesar Rp. 66.802.549.434 dan realisasi sebesar Rp. 62.808.838.359 atau 94,02%.

2.4.1 DATA SEKTORAL PERANGKAT DAERAH

Data sektoral di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Data Pelatihan di UPTD Latihan Kerja Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017			2018			2019			2020			2021		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Siswa Yang Dilatih	550	330	880	810	166	976	880	192	992	-	-	-	454	90	544
2.	Siswa yang Ditempatkan	290	25	315	590	30	620	420	123	563	-	-	-	110	32	142

Sumber : UPTD Latih Kerja, 2021

Berdasarkan table 2.6 jumlah pelatihan yang dilakukan di UPTD Latihan Kerja sebagai berikut :

Di Tahun 2017 siswa yang dilatih sebanyak 880 Orang, yang terdiri dari 550 Orang Laki-laki dan 330 Orang Perempuan. Dan jumlah siswa yang ditempatkan sebanyak 315 Orang, yang terdiri dari 290 Orang Laki-laki dan 25 Orang Perempuan.

Di Tahun 2018 siswa yang dilatih sebanyak 976 Orang, yang terdiri dari 810 Orang Laki-laki dan 166 Orang Perempuan. Dan jumlah siswa yang ditempatkan sebanyak 620 Orang, yang terdiri dari 590 Orang Laki-laki dan 30 Orang Perempuan.

Di Tahun 2019 siswa yang dilatih sebanyak 992 Orang, yang terdiri dari 880 Orang Laki-laki dan 192 Orang Perempuan. Dan jumlah siswa yang ditempatkan sebanyak 563 Orang, yang terdiri dari 420 Orang Laki-laki dan 123 Orang Perempuan.

Di Tahun 2020 UPTD tidak melaksanakan pelatihan di karenakan pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM, sehingga tidak bias melaksanakan pelatihan.

Di Tahun 2021 siswa yang dilatih sebanyak 554 Orang, yang terdiri dari 454 Orang Laki-laki dan 90 Orang Perempuan. Dan jumlah siswa yang ditempatkan sebanyak 142 Orang, yang terdiri dari 110 Orang Laki-laki dan 32 Orang Perempuan.

Tabel 2.7
Data Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 20217-2021

No.	Uraian	2017			2018			2019			2020			2021		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Disnakertrans Provinsi Banten	505	461	966	826	652	1.478	132	124	256	58	274	332	328	544	872

Sumber : Bid. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, 2021

Berdasarkan table 2.7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan pelatihan melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu pelatihan berbasis masyarakat sebagai berikut :

Di Tahun 2017 melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 966 Orang, yang terdiri dari 505 Orang Laki-laki dan 461 Orang Perempuan.

Di Tahun 2018 melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 1.478 Orang, yang terdiri dari 826 Orang Laki-laki dan 652 Orang Perempuan.

Di Tahun 2019 melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 256 Orang, yang terdiri dari 132 Orang Laki-laki dan 124 Orang Perempuan.

Di Tahun 2020 melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 332 Orang, yang terdiri dari 58 Orang Laki-laki dan 274 Orang Perempuan.

Di Tahun 2021 melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 872 Orang, yang terdiri dari 328 Orang Laki-laki dan 544 Orang Perempuan.

Tabel 2.8
Data Pemagangan Tenaga Kerja Tahun 2021-2021

No.	Uraian	2017			2018			2019			2020			2021		
		L	P	JML												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Disnakertrans Provinsi Banten	125	65	190	220	60	280	285	45	330	208	82	290	192	48	240

Sumber : Bid. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, 2021

Berdasarkan table 2.8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan pemagangan tenaga kerja melalui bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu pemagangan berbasis pengguna sebagai berikut :

Di Tahun 2017 pemagangan tenaga kerja sebanyak 190 Orang, yang terdiri dari 125 Orang laki-laki dan 65 Orang perempuan.

Di Tahun 2018 pemagangan tenaga kerja sebanyak 280 Orang, yang terdiri dari 220 Orang Laki-laki dan 60 Orang Perempuan.

Di Tahun 2019 pemagangan tenaga kerja sebanyak 330 Orang, yang terdiri dari 285 Orang Laki-laki dan 45 Orang Perempuan.

Di Tahun 2020 pemagangan tenaga kerja sebanyak 290 Orang, yang terdiri dari 208 Orang Laki-laki dan 82 Orang Perempuan.

Di Tahun 2021 pemagangan tenaga kerja sebanyak 240 Orang, yang terdiri dari 192 Orang Laki-laki dan 48 Orang Perempuan.

Tabel 2.9
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Tahun 2017-2022

NO.	Kab/Kota	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kabupaten Pandeglang	46	49	52	54	57	62
2	Kabupaten Lebak	68	71	74	74	76	85
3	Kabupaten Serang	17	18	20	24	28	30
4	Kabupaten Tangerang	18	19	20	22	27	31
5	Kota Serang	10	11	11	12	12	13
6	Kota Cilegon	21	23	23	24	26	31
7	Kota Tangerang	20	20	22	23	23	24
8	Kota Tangerang Selatan	29	29	30	30	32	34
Jumlah		229	240	252	263	281	310

Sumber : Bid. Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Berdasarkan table 2.9 data Lemabaga Pelatihan Kerja (LPK) Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Di Tahun 2017, di Kabupaten Pandeglang sebanyak 46 LPK, Kabupaten Lebak sebanyak 63 LPK, Kabupaten Serang sebanyak 17 LPK, Kabupaten Tangerang sebanyak 18 LPK, Kota Serang sebanyak 10 LPK, Kota Cilegon sebanyak 21 LPK, Kota Tangerang sebanyak 20 LPK, Kota Tangerang Selatan sebanyak 29 LPK dan Jumlah LPK Se-Provinsi Banten di Tahun 2017 sebanyak 229 LPK.

Di Tahun 2018, di Kabupaten Pandeglang sebanyak 49 LPK, Kabupaten Lebak sebanyak 71 LPK, Kabupaten Serang sebanyak 18 LPK, Kabupaten Tangerang sebanyak 19 LPK, Kota Serang sebanyak 11 LPK, Kota Cilegon sebanyak 23 LPK, Kota Tangerang sebanyak 20 LPK, Kota Tangerang Selatan sebanyak 29 LPK dan Jumlah LPK Se-Provinsi Banten di Tahun 2018 sebanyak 240 LPK.

Di Tahun 2019, di Kabupaten Pandeglang sebanyak 52 LPK, Kabupaten Lebak sebanyak 74 LPK, Kabupaten Serang sebanyak 20 LPK, Kabupaten Tangerang sebanyak 20 LPK, Kota Serang sebanyak 11 LPK, Kota Cilegon sebanyak 23 LPK, Kota Tangerang sebanyak 22 LPK, Kota Tangerang Selatan sebanyak 30 LPK dan Jumlah LPK Se-Provinsi Banten di Tahun 2019 sebanyak 252 LPK.

Di Tahun 2020, di Kabupaten Pandeglang sebanyak 54 LPK, Kabupaten Lebak sebanyak 74 LPK, Kabupaten Serang sebanyak 20 LPK, Kabupaten Tangerang sebanyak 20 LPK, Kota Serang sebanyak 12 LPK, Kota Cilegon sebanyak 24 LPK, Kota Tangerang sebanyak 23 LPK, Kota Tangerang Selatan sebanyak 30 LPK dan Jumlah LPK Se-Provinsi Banten di Tahun 2020 sebanyak 263 LPK.

Di Tahun 2021, di Kabupaten Pandeglang sebanyak 57 LPK, Kabupaten Lebak sebanyak 76 LPK, Kabupaten Serang sebanyak 28 LPK, Kabupaten Tangerang sebanyak 27 LPK, Kota Serang sebanyak 12 LPK, Kota Cilegon sebanyak 26 LPK, Kota Tangerang sebanyak 23 LPK, Kota Tangerang Selatan sebanyak 32 LPK dan Jumlah LPK Se-Provinsi Banten di Tahun 2021 sebanyak 281 LPK.

Di Tahun 2020, di Kabupaten Pandeglang sebanyak 62 LPK, Kabupaten Lebak sebanyak 85 LPK, Kabupaten Serang sebanyak 30 LPK, Kabupaten Tangerang sebanyak 31 LPK, Kota Serang sebanyak 13 LPK, Kota Cilegon sebanyak 31 LPK, Kota Tangerang sebanyak 24 LPK, Kota Tangerang Selatan sebanyak 34 LPK dan Jumlah LPK Se-Provinsi Banten di Tahun 2022 sebanyak 310 LPK.

Tabel 2.10
Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017			2018			2019			2020			2021		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Pencari Kerja yang Terdaftar	70,006	55,004	125,010	79,513	80,947	160,460	86,448	86,131	172,579	49,286	47,014	96,300	49,425	50,886	100,311
2	Lowongan Kerja	75,884	59,624	135,508	16,982	18,183	35,165	27,708	41,176	68,884	17,490	22,380	39,870	18,340	22,672	41,012
3	Pencari Kerja yang ditempatkan	10,193	8,008	18,201	16,520	17,666	34,186	25,467	38,245	63,712	9,469	11,872	21,341	9,953	12,327	22,280

Sumber : Bid. Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Berdasarkan tabel 2.10 informasi pasar kerja (IPK) Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Di Tahun 2017 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 125.010 Orang, yang terdiri dari 70.006 Orang Laki-laki dan 55.004 Orang Perempuan. Lowongan kerja sebanyak 135.508 Orang, yang terdiri dari untuk Laki-laki sebanyak 75.884 Orang dan untuk Perempuan sebanyak 59.624 Orang. Dari pencari kerja yang terdaftar dan lowongan kerja yang tersedia, pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 18.201 Orang, yang terdiri dari 10.193 Orang laki-laki dan 8.008 Orang Perempuan.

Di Tahun 2018 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 160.460 Orang, yang terdiri dari 79.518 Orang Laki-laki dan 80.947 Orang Perempuan. Lowongan kerja sebanyak 35.165 Orang, yang terdiri dari untuk Laki-laki sebanyak 16.982 Orang dan untuk Perempuan sebanyak 18.183 Orang. Dari pencari kerja yang terdaftar dan lowongan kerja yang tersedia, pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 34.186 Orang, yang terdiri dari 16.520 Orang laki-laki dan 17.666 Orang Perempuan.

Di Tahun 2019 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 172.579 Orang, yang terdiri dari 86.448 Orang Laki-laki dan 86.131 Orang Perempuan. Lowongan kerja sebanyak 68.884 Orang, yang terdiri dari untuk Laki-laki sebanyak 27.708 Orang dan untuk Perempuan sebanyak 41.176 Orang. Dari pencari kerja yang terdaftar dan lowongan kerja yang tersedia, pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 63.712 Orang, yang terdiri dari 25.467 Orang laki-laki dan 38.245 Orang Perempuan.

Di Tahun 2020 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 90.300 Orang, yang terdiri dari 49.286 Orang Laki-laki dan 47.014 Orang Perempuan. Lowongan kerja sebanyak 39.870 Orang, yang terdiri dari untuk Laki-laki sebanyak 17.490 Orang dan untuk Perempuan sebanyak 22.380 Orang. Dari pencari kerja yang terdaftar dan lowongan kerja yang tersedia, pencari kerja yang

ditempatkan sebanyak 21.341 Orang, yang terdiri dari 9.469 Orang laki-laki dan 11.872 Orang Perempuan.

Di Tahun 2021 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 100.311 Orang, yang terdiri dari 49.425 Orang Laki-laki dan 50.886 Orang Perempuan. Lowongan kerja sebanyak 41.012 Orang, yang terdiri dari untuk Laki-laki sebanyak 18.340 Orang dan untuk Perempuan sebanyak 22.672 Orang. Dari pencari kerja yang terdaftar dan lowongan kerja yang tersedia, pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 22.280 Orang, yang terdiri dari 9.958 Orang laki-laki dan 12.327 Orang Perempuan.

Tabel 2.11
Data Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun 2016-2021

NO.	Kab/Kota	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021/NOV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Provinsi Banten	513	402	358	444	260	220
2	Kabupaten Serang	1,099	1,306	1,199	1,575	1,363	1,128
3	Kota Serang	5	7	6	8	7	2
4	Kabupaten Lebak	2	2	11	5	47	17
5	Kabupaten Pandeglang	-	2	2	1	-	1
6	Kota Cilegon	272	243	337	949	678	718
7	Kabupaten Tangerang	1,336	1,296	1,332	2,293	1,738	1,512
8	Kota Tangerang	431	434	440	765	646	499
9	Kota Tangerang Selatan	130	182	207	552	486	469
JUMLAH		3.788	3.874	3.892	6.592	5.225	4.566

Sumber : Bid. Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Berdasarkan tabel 2.11 Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Di Tahun 2016 data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 513 Orang. Sedangkan di Kabupaten Serang jumlah Tenaga Kerja Asing sebanyak 1.099 Orang, Kota Serang sebanyak 5 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 2 Orang, Kabupaten Pandeglang sebanyak 0 Orang, Kota Cilegon sebanyak 272 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 1.336 Orang, Kota Tangerang sebanyak 431 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 130 Orang. Jumlah Total Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Banten di tahun 2016 sebanyak 3.788 Orang.

Di Tahun 2017 data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 402 Orang. Sedangkan di Kabupaten Serang jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 1.306 Orang, Kota Serang sebanyak 7 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 2 Orang, Kabupaten Pandeglang sebanyak 2 Orang, Kota Cilegon sebanyak 243 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 1.296 Orang, Kota Tangerang sebanyak 434 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 182 Orang. Jumlah Total Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Banten di tahun 2017 sebanyak 3.874 Orang.

Di Tahun 2018 data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 358 Orang. Sedangkan di Kabupaten Serang jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 1.199 Orang, Kota Serang sebanyak 6 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 11 Orang, Kabupaten Pandeglang sebanyak 2 Orang, Kota Cilegon sebanyak 337 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 1.332 Orang, Kota Tangerang sebanyak 440 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 207 Orang. Jumlah Total Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Banten di tahun 2018 sebanyak 3.892 Orang.

Di Tahun 2019 data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 444 Orang. Sedangkan di Kabupaten Serang jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 1.575 Orang, Kota Serang sebanyak 8 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 5 Orang, Kabupaten Pandeglang sebanyak 1 Orang, Kota Cilegon sebanyak 949 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 2.293 Orang, Kota Tangerang sebanyak 765 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 552 Orang. Jumlah Total Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Banten di tahun 2019 sebanyak 6.592 Orang.

Di Tahun 2020 data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 260 Orang. Sedangkan di Kabupaten Serang jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 1.363 Orang, Kota Serang sebanyak 7 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 47 Orang, Kabupaten Pandeglang sebanyak 0 Orang, Kota Cilegon sebanyak 678 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 1.738 Orang, Kota Tangerang sebanyak 646 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 486 Orang. Jumlah Total Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Banten di tahun 2020 sebanyak 5.225 Orang.

Di Tahun 2021 data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 220 Orang. Sedangkan di Kabupaten Serang jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 1.128 Orang, Kota Serang sebanyak 2 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 17 Orang, Kabupaten Pandeglang sebanyak 1 Orang, Kota Cilegon sebanyak 718 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 1.512 Orang, Kota Tangerang sebanyak 499 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 469 Orang. Jumlah Total Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Banten di tahun 2021 sebanyak 4.566 Orang.

Tabel 2.12
Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2017-2022

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PMI																	
		2017			2018			2019			2020			2021			2022		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	KABUPATEN PANDEGLANG	31	341	372	117	420	537	65	406	471	4	83	87	6	20	26	3	0	3
2	KABUPATEN LEBAK	15	31	46	20	41	61	10	28	38	0	2	2	2	6	8	11	0	11
3	KABUPATEN SERANG	84	328	412	86	240	326	64	242	306	2	55	57	9	13	22	5	0	5
4	KABUPATEN TANGERANG	2	43	45	3	64	67	5	67	72	2	9	11	5	8	13	0	0	0
5	KOTA SERANG	17	62	79	14	47	61	11	39	50	0	5	5	0	5	5	0	0	0
6	KOTA CILEGON	39	46	85	25	57	82	18	25	43	0	0	0	0	1	1	0	1	1
7	KOTA TANGERANG	2	21	23	0	26	26	1	30	31	1	5	6	0	9	9	1	2	3
8	KOTA TANGERANG SELATAN	0	4	4	1	9	10	0	6	6	0	0	0	3	3	6	0	0	0
	JUMLAH	190	876	1066	266	904	1170	174	843	1017	9	159	168	25	65	90	20	3	23

Sumber : Bid. Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2022

Berdasarkan tabel 2.12 data penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Di Tahun 2017 Kabupaten Pandeglang sebanyak 372 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 46 Orang, Kabupaten Serang sebanyak 412 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 45 Orang, Kota Serang sebanyak 79 Orang, Kota Cilegon sebanyak 85 Orang, Kota Tangerang sebanyak 23 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 4 Orang. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Banten Tahun 2017 sebanyak 1.066 Orang.

Di Tahun 2018 Kabupaten Pandeglang sebanyak 537 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 61 Orang, Kabupaten Serang sebanyak 326 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 67 Orang, Kota Serang sebanyak 61 Orang, Kota Cilegon sebanyak 82 Orang, Kota Tangerang sebanyak 26 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 10 Orang. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Banten Tahun 2018 sebanyak 1.170 Orang.

Di Tahun 2019 Kabupaten Pandeglang sebanyak 471 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 38 Orang, Kabupaten Serang sebanyak 306 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 72 Orang, Kota Serang sebanyak 50 Orang, Kota Cilegon sebanyak 43 Orang, Kota Tangerang sebanyak 31 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 6 Orang. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Banten Tahun 2019 sebanyak 1.017 Orang.

Di Tahun 2020 Kabupaten Pandeglang sebanyak 87 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 2 Orang, Kabupaten Serang sebanyak 57 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 11 Orang, Kota Serang sebanyak 5 Orang, Kota Cilegon sebanyak 0 Orang, Kota Tangerang sebanyak 6 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 0 Orang. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Banten Tahun 2020 sebanyak 168 Orang.

Di Tahun 2021 Kabupaten Pandeglang sebanyak 26 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 8 Orang, Kabupaten Serang sebanyak 22 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 13 Orang, Kota Serang sebanyak 5 Orang, Kota Cilegon sebanyak 1 Orang, Kota Tangerang sebanyak 9 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 3 Orang. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Banten Tahun 2021 sebanyak 90 Orang.

Di Tahun 2022 Kabupaten Pandeglang sebanyak 3 Orang, Kabupaten Lebak sebanyak 11 Orang, Kabupaten Serang sebanyak 5 Orang, Kabupaten Tangerang sebanyak 0 Orang, Kota Serang sebanyak 0 Orang, Kota Cilegon sebanyak 1 Orang, Kota Tangerang sebanyak 3 Orang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 0 Orang. Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Banten Tahun 2022 sebanyak 23 Orang.

Tabel 2.13
Jumlah Perusahaan di Banten Tahun 2019-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kabupaten Pandeglang	-	-	-	431	431	431
2	Kabupaten Lebak	-	-	-	462	462	462
3	Kabupaten Serang	-	-	-	804	804	804
4	Kabupaten Tangerang	-	-	-	4.473	6.620	6.620
5	Kota Serang	-	-	-	558	558	517
6	Kota Cilegon	-	-	-	1.478	1.478	1.504
7	Kota Tangerang	-	-	-	5.411	6.947	7.934
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	4.769	6.452	7.397
JUMLAH		-	-	-	18.386	23.752	25.669

Sumber : Bid. Pengawasan Ketenagakerjaan, 2022

Berdasarkan tabel 2.13 jumlah perusahaan Tahun 2019-2022 sebagai berikut :

Di Tahun 2020 jumlah perusahaan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 431 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 462 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 804 perusahaan, Kabupaten tangerang sebanyak 4.473 perusahaan, Kota serang sebanyak 558 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 1.478 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 5.411 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 4.769 perusahaan. Jumlah perusahaan di Provinsi Banten Tahun 2020 sebanyak 18.386 perusahaan.

Di Tahun 2021 jumlah perusahaan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 431 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 462 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 804 perusahaan, Kabupaten tangerang sebanyak 6.620 perusahaan, Kota serang sebanyak 558 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 1.478 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 6.947 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 4.452 perusahaan. Jumlah perusahaan di Provinsi Banten Tahun 2021 sebanyak 23.752 perusahaan.

Di Tahun 2022 jumlah perusahaan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 431 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 462 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 804 perusahaan, Kabupaten tangerang sebanyak 6.620 perusahaan, Kota serang sebanyak 517 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 1.504 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 7.934 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 7.397 perusahaan. Jumlah perusahaan di Provinsi Banten Tahun 2022 sebanyak 25.669 perusahaan.

Tabel 2.14
Jumlah Pengawasan Ketenagakerjaan Ke Perusahaan Tahun 2017-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kabupaten Pandeglang	-	-	-	20	13	5
2	Kabupaten Lebak	-	-	-	15	8	-
3	Kabupaten Serang	-	276	250	157	168	54
4	Kabupaten Tangerang	2.119	1.464	1.033	451	293	432
5	Kota Serang	-	-	-	100	250	100
6	Kota Cilegon	-	-	-	165	500	190
7	Kota Tangerang	928	997	813	82	490	158
8	Kota Tangerang Selatan	466	411	411	18	115	64
	JUMLAH	3.513	3.148	2.507	1.008	1.837	1.003

Sumber : Bid. Pengawasan Ketenagakerjaan, 2021

Berdasarkan tabel 2.14 jumlah pengawasan ke perusahaan Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Di Tahun 2017 pengawasan ke perusahaan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Tangerang sebanyak 2.119 perusahaan, Kota Serang sebanyak 0 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 0 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 928 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 466 perusahaan. Jumlah pengawasan ke perusahaan Tahun 2017 sebanyak 3.513 perusahaan.

Di Tahun 2018 pengawasan ke perusahaan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 276 perusahaan, Kabupaten Tangerang sebanyak 1.464 perusahaan, Kota Serang sebanyak 0 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 0 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 997 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 411 perusahaan. Jumlah pengawasan ke perusahaan Tahun 2018 sebanyak 3.148 perusahaan.

Di Tahun 2019 pengawasan ke perusahaan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 250 perusahaan, Kabupaten Tangerang sebanyak 1.033 perusahaan, Kota Serang sebanyak 0 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 0 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 813 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 411 perusahaan. Jumlah pengawasan ke perusahaan Tahun 2019 sebanyak 2.507 perusahaan.

Di Tahun 2020 pengawasan ke perusahaan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 20 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 15 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 157 perusahaan, Kabupaten Tangerang sebanyak 451 perusahaan, Kota Serang sebanyak 100 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 165 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 82 perusahaan dan Kota

Tangerang Selatan sebanyak 18 perusahaan. Jumlah pengawasan ke perusahaan Tahun 2020 sebanyak 1.008 perusahaan.

Di Tahun 2021 pengawasan ke perusahaan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 13 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 8 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 168 perusahaan, Kabupaten Tangerang sebanyak 293 perusahaan, Kota Serang sebanyak 250 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 500 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 490 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 115 perusahaan. Jumlah pengawasan ke perusahaan Tahun 2021 sebanyak 1.837 perusahaan.

Di Tahun 2022 pengawasan ke perusahaan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 5 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 54 perusahaan, Kabupaten Tangerang sebanyak 432 perusahaan, Kota Serang sebanyak 100 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 190 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 158 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 64 perusahaan. Jumlah pengawasan ke perusahaan Tahun 2022 sebanyak 1.003 perusahaan.

Tabel 2.15
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan SMK3 Tahun 2019-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Pandeglang	-	-	3	-	-
2	Kabupaten Lebak	-	-	1	-	1
3	Kabupaten Serang	-	-	3	1	7
4	Kabupaten Tangerang	-	-	12	12	15
5	Kota Serang	-	-	5	1	3
6	Kota Cilegon	-	-	13	5	12
7	Kota Tangerang	-	-	15	19	32
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	4	8	20
	JUMLAH	-	-	56	46	90

Sumber : Bid. Pengawasan Ketenagakerjaan, 2021

Berdasarkan tabel 2.15 jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 di perusahaan Tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Di Tahun 2019 perusahaan yang menerapkan SMK3 yang mendapatkan penghargaan Zero Accident di Kabupaten Pandeglang sebanyak 3 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 1 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 3 perusahaan, Kabupaten Tangerang sebanyak 12 perusahaan, Kota Serang sebanyak 5 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 13 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 15 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 4 perusahaan. Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 yang mendapatkan penghargaan Zero Accident Tahun 2019 sebanyak 56 perusahaan.

Di Tahun 2020 perusahaan yang menerapkan SMK3 yang mendapatkan penghargaan Zero Accident di Kabupaten Pandeglang sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 1 perusahaan, Kabupaten Tangerang sebanyak 12 perusahaan, Kota Serang sebanyak 1 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 5 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 19 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 8 perusahaan. Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 yang mendapatkan penghargaan Zero Accident Tahun 2020 sebanyak 46 perusahaan.

Di Tahun 2021 perusahaan yang menerapkan SMK3 yang mendapatkan penghargaan Zero Accident di Kabupaten Pandeglang sebanyak 0 perusahaan, Kabupaten Lebak sebanyak 1 perusahaan, Kabupaten Serang sebanyak 7 perusahaan, Kabupaten Tangerang sebanyak 15 perusahaan, Kota Serang sebanyak 3 perusahaan, Kota Cilegon sebanyak 12 perusahaan, Kota Tangerang sebanyak 32 perusahaan dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 20 perusahaan. Jumlah perusahaan yang

menerapkan SMK3 yang mendapatkan penghargaan Zero Accident Tahun 2021 sebanyak 90 perusahaan.

Tabel 2.16
Jumlah Perusahaan yang Melakukan Penangguhan Upah Tahun 20217-2021

NO	PROVINSI	2017		2018		2019		2020		2021	
		Mengajukan	Disetujui								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Provinsi Banten	78	72	71	67	69	68	74	71	147	133

Sumber : Bid. Hubungan Industrial dan Jamsos, 2021

Berdasarkan tabel 2.16 perusahaan yang melakukan penangguhan upah Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Di Tahun 2017 jumlah pengajuan penangguhan upah sebanyak 78 pengajuan, disetujui sebanyak 72 pengajuan dan 6 pengajuan di tolak.

Di Tahun 2018 jumlah pengajuan penangguhan upah sebanyak 71 pengajuan, disetujui sebanyak 67 pengajuan dan 4 pengajuan di tolak.

Di Tahun 2019 jumlah pengajuan penangguhan upah sebanyak 69 pengajuan, disetujui sebanyak 68 pengajuan dan 1 pengajuan di tolak.

Di Tahun 2020 jumlah pengajuan penangguhan upah sebanyak 74 pengajuan, disetujui sebanyak 71 pengajuan dan 3 pengajuan di tolak.

Di Tahun 2021 jumlah pengajuan penangguhan upah sebanyak 147 pengajuan, disetujui sebanyak 133 pengajuan dan 14 pengajuan di tolak.

Tabel 2.17
Daftar UMP dan UMK Tahun 20217-2022

No.	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Upah Minimum Provinsi (UMP)						
-	Provinsi	Rp. 1.931.180.	Rp. 2.099.385,778	Rp. 2.267.990,546	Rp. 2.460.996,54	Rp. 2.460.996,54	Rp. 2.460.996,54
B.	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)						
1	Kab. Pandeglang	Rp. 2.164.979,43	Rp. 2.353.549,14	Rp. 2.542.539,13	Rp. 2.758.909,00.	Rp. 2.800.292,64	Rp. 2.800.292,64
2	Kab. Lebak	Rp. 2.127.112,50	Rp. 2.312.384,00	Rp. 2.498.068,44	Rp. 2.710.654,00	Rp. 2.751.313,81	Rp. 2.773.590,40
3	Kab. Serang	Rp. 3.258.866,25	Rp. 3.542.713,50	Rp. 3.827.193,39	Rp. 4.152.887,55	Rp. 4.215.180,86	Rp. 4.215.180,86
4	Kab. Tangerang	Rp. 3.270.936,13	Rp.3.555.834,67	Rp. 3.841.368,19	Rp. 4.168.268,62	Rp. 4.230.792,65	Rp. 4.230.792,65
5	Kota Tangerang	Rp. 3.295.075,88	Rp. 3.582.076,99	Rp. 3.869.717,00	Rp. 4.199.029,92	Rp. 4.262.016,37	Rp. 4.285.798,90
6	Kota Tangerang Selatan	Rp. 3.270.936,13	Rp.3.555.834,67	Rp. 3.841.368,19	Rp. 4.168.268,62	Rp. 4.230.792,65	Rp. 4.280.214,51
7	Kota Serang	Rp. 2.866.595,31	Rp. 3.116.275,76	Rp. 3.366.512,71	Rp. 3.773.940,00	Rp. 3.830.549,10	Rp. 3.850.526,18
8	Kota Cilegon	Rp. 3.331.997,62	Rp. 3.622.214,61	Rp. 3.913.078,44	Rp. 4.246.081,42	Rp. 4.309.772,64	Rp. 4.340.254,18

Sumber : Bid. Hubungan Industrial dan Jamsos, 2022

Berdasarkan tabel 2.17 daftar UMP dan UMK Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Di Tahun 2017 UMP sebesar Rp. 1.931.180. dan UMK di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 2.164.979,43, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 2.127.112,50, Kabupaten Serang sebesar Rp. 3.258.866,25, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 3.270.936,13, Kota Serang sebesar Rp. 2.866.595,31, Kota Cilegon sebesar Rp. 3.331.997,62, Kota Tangerang sebesar Rp. 3.295.075,88 dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 3.270.936,13.

Di Tahun 2018 UMP sebesar Rp. 2.099.385,778, dan UMK di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 2.353.549,14, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 2.312.384,00, Kabupaten Serang sebesar Rp. 3.542.713,50, Kabupaten Tangerang sebesar Rp.3.555.834,67, Kota Serang sebesar Rp. 3.116.275,76, Kota Cilegon sebesar Rp. 3.622.214,61, Kota Tangerang sebesar Rp. 3.582.076,99 dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.3.555.834,67.

Di Tahun 2019 UMP sebesar Rp. 2.267.990,546, dan UMK di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 2.542.539,13, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 2.498.068,44, Kabupaten Serang sebesar Rp. 3.827.193,39, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 3.841.368,19, Kota Serang sebesar Rp. 3.366.512,71, Kota Cilegon sebesar Rp. 3.913.078,44, Kota Tangerang sebesar Rp. 3.869.717,00 dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 3.841.368,19.

Di Tahun 2020 UMP sebesar Rp. 2.460.996,54, dan UMK di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 2.758.909,00, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 2.710.654,00, Kabupaten Serang sebesar Rp. 4. 152.887,55, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 4.168.268,62, Kota Serang sebesar Rp. 3.773.940,00, Kota Cilegon sebesar Rp. 4.246.081,42, Kota Tangerang sebesar Rp. 4.199.029,92 dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 4.168.268,62.

Di Tahun 2021 UMP sebesar Rp. 2.460.996,54, dan UMK di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 2.800.292,64, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 2.751.313,81, Kabupaten Serang sebesar Rp. 4.215.180,86, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 4.230.792,65, Kota Serang sebesar Rp. 3.830.549,10, Kota Cilegon sebesar Rp. 4.309.772,64, Kota Tangerang sebesar Rp. 4.262.016,37 dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 4.230.792,65.

Di Tahun 2022 UMP sebesar Rp. 2.460.996,54, dan UMK di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 2.800.292,64, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 2.773.590,40, Kabupaten Serang sebesar Rp. 4.215.180,86, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 4.230.792,65, Kota Serang sebesar Rp. 3.850.526,18, Kota Cilegon sebesar Rp. 4.340.254,18, Kota Tangerang sebesar Rp. 4.285.798,90 dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 4.280.214.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Faktor internal yang menjadi permasalahan dalam organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten antara lain :

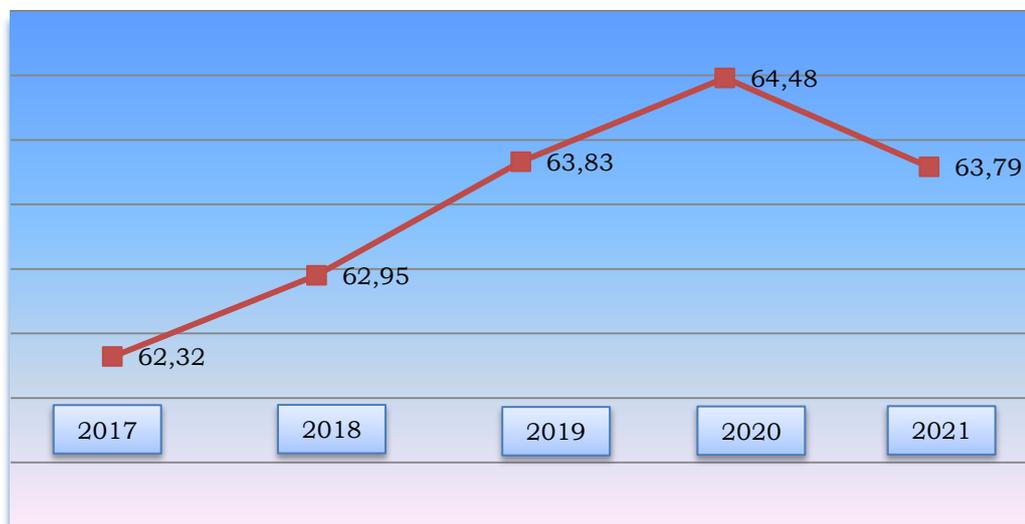
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan;
2. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan di UPTD Latihan Kerja;
3. Hanya memiliki 1 UPTD Latihan Kerja;
4. Belum maksimalnya koordinasi antar bidang serta antar Perangkat Daerah yang terkait ketenagakerjaan.

Sedangkan faktor eksternal yang masih akan dihadapi dalam jangka waktu mendatang (2023 - 2026) masih tingginya jumlah pengangguran terbuka (TPT) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada dua tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2017 – 2022 tidak mencapai angka yang ditargetkan. Pada tahun 2017 TPT Provinsi Banten adalah 9,28% sementara angka yang ditargetkan adalah 8,69%. Sementara pada tahun 2018, meskipun mengalami penurunan, tetapi TPT Provinsi Banten adalah 8,52% masih di atas angka yang ditargetkan yaitu 8,45%. Pada tahun 2019 TPT Provinsi Banten adalah 8,11%, angka ini melampaui target yang direncanakan yaitu 8,20%. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 6,26 juta orang, naik 47,42 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,69 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 8,98 persen, turun 1,66 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 5,69 juta orang, naik sebanyak 146,17 ribu orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,67 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Jasa Lainnya (1,80 persen poin). Sebanyak 2,78 juta orang (48,87 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,31 persen poin dibanding Agustus 2020. Persentase setengah penganggur turun sebesar 1,70 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,97 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Terdapat 1,22 juta orang (12,45 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (99,85 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (36,01 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (55,33 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (1,03 juta orang). Indikator kinerja ekonomi dan sosial yang perlu dianalisis dalam melihat perkembangan pembangunan

di suatu wilayah adalah aspek ketenagakerjaan, seperti banyaknya jumlah orang yang bekerja dan penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk pada rentang usia penduduk usia kerja yakni 15 tahun dan lebih. Adapun angkatan kerja sendiri dapat diartikan sebagai kelompok penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sehingga, TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah pada waktu tertentu. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 3.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi
Banten Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun

Lebih lanjut, indikator analisis ketenagakerjaan lainnya yang dapat dilihat adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini

dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja. TPT Provinsi Banten mengalami tren yang cukup fluktuatif sepanjang tahun 2017-2020. Nilainya meningkat di tahun 2017 sebelum secara konsisten menurun hingga tahun 2019. Namun, meningkat tajam di tahun 2020 akibat adanya pandemi. TPT Provinsi Banten di tahun 2020 tercatat sebesar 10,64 persen. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di tahun 2017 yang hanya sebesar 9,28 persen. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,98 persen.

Tabel 3.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi
Banten Tahun 2021 (Persen)

Kab/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)				
	2021	2020	2019	2018	2017
Kab. Pandeglang	7.70	9.15	8.67	8.19	8.30
Kab Lebak	7.86	9.63	7.96	7.57	8.88
Kab. Tangerang	9.06	13.06	8.92	9.63	10.57
Kab. Serang	10.58	12.22	10.58	12.63	13.00
Kota Tangerang	9.07	8.63	7.14	7.39	7.16
Kota Cilegon	10.13	12.69	9.64	9.21	11.88
Kota Serang	9.41	9.26	8.07	8.10	8.43
Kota Tangerang Selatan	8.60	8.48	4.78	4.67	6.83
Provinsi Banten	8.98	10.64	8.11	8.47	9.28

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2021

Beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang memiliki angka TPT lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi secara keseluruhan adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sementara

kabupaten dan kota sisanya memiliki angka TPT di bawah rata-rata. TPT di Kota Cilegon paling tinggi di tahun 2021 dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di daerah ini masih sangat terbatas.

Permasalahan tersebut diatas bila tidak ditanggulangi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian Visi Provinsi Banten secara umum. Karena keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten Tahun 2023 - 2026, yaitu : “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah” untuk mencapai Banten Maju dan Mandiri diantaranya dicirikan dengan menurunnya angka pengangguran, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan peningkatan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) di Provinsi Banten yang ditandai dengan kearifan lokal yang menjunjung tinggi konsep iman dan Taqwa dalam implementasinya Akhlaqul karimah maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis serta masyarakat yang maju dan berdaya saing.

3.2 TELAAHAM VISI, MISI RPJPD

3.2.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Daerah di akhir periode perencanaan dan visi memegang peranan penting dalam menentukan kemana arah yang akan dituju oleh

Daerah dimasa mendatang berdasarkan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Memasuki era pembangunan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 atau empat tahun mendatang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2023 - 2026, yaitu :

**“ Banten Yang Maju, Mandiri, Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Taqwa “**

“Maju” :

Provinsi Banten yang Maju berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara - cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip - prinsip baik, bersih dan berwibawa. Beberapa indikator indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah : adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

“Mandiri” :

Provinsi Banten yang Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan

fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

“Sejahtera” :

Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

“Berlandaskan Iman dan Taqwa” :

Provinsi Banten yang Berlandaskan Iman dan Taqwa berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai - nilai agama, yaitu nilai - nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa parameter berlandaskan iman dan taqwa ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implemetasi terhadap rumusannya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah dan lingkungan pendidikan dengan partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di Provinsi Banten. Hal ini menjadi penting karena pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan pembangunan secara umum dan juga merupakan tujuan utama pembangunan. Dengan semakin meningkatnya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka semakin memungkinkan tercapainya Banten Maju dan Mandiri pada akhir periode perencanaan (tahun 2026).

Uraian tersebut mencerminkan betapa strategisnya kedudukan dan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam mewujudkan harapan pencapaian pembangunan 2023 - 2026.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai - nilai yang dapat diperoleh berdasarkan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Berkaitan dengan perumusan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023 - 2026, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas,** ditujukan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat dan Meningkatkan Pemerataan dan Kesempatan Kerja Masyarakat;

- 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan,** ditujukan untuk Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi;
- 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari,** ditujukan untuk Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari;
- 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa,** ditujukan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Sedangkan program yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten terdiri dari 2 (dua) misi, yaitu :

1. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026. Memperhatikan Visi 2023 – 2026 yaitu : “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa“ yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yang dilaksanakan secara bertahap melalui Rencana Kerja

Tahunan sebagai wujud dari pelaksanaan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan Peraturan perundang - undangan tersebut Kebijakan Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam pembangunan Bidang Ketenagakerjaan yaitu :

Tabel 3.2
Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 – 2024

NO	LOMPATAN	ARAH KEBIJAKAN
1.	Transformasi BLK	Mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat Pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional
2.	<i>Link and Match</i> Ketenagakerjaan	Membangun integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif Untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja
3.	Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja	Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan
4.	Pengembangan Talenta Muda	Mengembangkan dan mengelola potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut <i>future job</i> yang dinamis dan fleksibel
5.	Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri	Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas Negara penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan Memasifikasi pengisian jabatan di

		sektor formal
6.	Visi Baru Hubungan Industrial	Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan
7.	Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatkan kualitas dan efektivitas system pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 yang berintegritas dan kredibel
8.	Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan	Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan Ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital Ketenagakerjaan terbesar di Indonesia
9.	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah yang berdampak selain pada tingkat kualitas pelayanan dasar juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan agar menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010 - 2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011.

Perbaikan dan peningkatan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada dasarnya merupakan tujuan dan orientasi utama pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang tidak hanya diukur berdasarkan parameter sektoral semata, melainkan pada akhirnya akan diukur berdasarkan dampak atau pengaruhnya terhadap upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan yang erat antar berbagai bidang pembangunan yang ujungnya akan bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan tujuannya pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) di Provinsi Banten.

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia;
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah;
3. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
4. Tantangan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
5. Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
6. Implementasikan kebijakan reformasi birokrasi belum optimal.

Berdasarkan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten tersebut, yang terkait dengan tugas pokok tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten adalah isu ke - 3 masalah Masih rendahnya kompetensi dan daya

saing tenaga kerja dan isu ke - 4 Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan.

3. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja. TPT Provinsi Banten mengalami tren yang cukup fluktuatif sepanjang tahun 2017-2020. Nilainya meningkat di tahun 2017 sebelum secara konsisten menurun hingga tahun 2019. Namun, meningkat tajam di tahun 2020 akibat adanya pandemi. TPT Provinsi Banten di tahun 2020 tercatat sebesar 10,64 persen. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di tahun 2017 yang hanya sebesar 9,28 persen. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,98 persen. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi di atas angka nasional salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Banten. Isu rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja ini merupakan masalah yang harus segera ditangani secara terukur dengan melaksanakan program/kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Banten. Sehingga para pencari kerja dapat bersaing dan terserap pasar kerja.

4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan.

Hal-hal yang masih menjadi fokus permasalahan pembangunan bidang pemerintahan, antara lain :

1. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa;
2. Rendahnya Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa;
3. Belum Optimalnya Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Isu strategis menggambarkan prioritas penanganan yang perlu dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, maka penentuan isu-isu strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah :
 - Peningkatan pemerataan dan kesempatan kerja masyarakat.
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik :
 - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan Tujuan Pembangunan Daerah sebagai suatu Strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

- 1) “Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan” mempunyai tujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator antara lain Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial, Pengupahan Tenaga Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kondisi Lingkungan Kerja.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah” mempunyai tujuan terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

4.2 SASARAN

Adapun sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas

- 1) “Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang berkualitas” mempunyai sasaran untuk peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan” mempunyai sasaran untuk terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel.

Untuk tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2023 -2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE -			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	68,26 Persen	71,85 Persen	74,25 Persen	76,04 Persen
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70-80 Nilai	70-80 Nilai	70-80 Nilai	70-80 Nilai

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut untuk mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 dilaksanakan dengan penetapan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan :

1) Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas :

- **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)**, dengan target sasaran kinerja pada tahun 2023 sejumlah 68,26 persen, tahun 2024 sejumlah 71,85 persen, tahun 2025 sejumlah 74,25 persen dan tahun 2026 sejumlah 76,04 persen.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah :

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- Capaian SAKIP Perangkat Daerah, dengan target sasaran kinerja tahun 2023 sejumlah 70-80 nilai, tahun 2024 sejumlah 70-80 nilai, tahun 2025 sejumlah 70-80 nilai dan tahun 2026 sejumlah 70-80 nilai.

Realisasi target sasaran kinerja yang pada masing - masing indikator sasaran dengan target kinerja sasaran sampai dengan akhir tahun Renstra (tahun 2026) direncanakan mencapai 100 persen.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu Strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu :

1. Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Pelatihan Calon Tenaga Kerja;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan rumusan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada tahun 2023 - 2026.

Adapun Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Pelatihan Calon Tenaga Kerja :

- 1) “Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Pelatihan Calon Tenaga Kerja” mempunyai strategi untuk mengedepankan pendekatan kompetensi dan daya saing dengan mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja guna peningkatan kompetensi dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- 1) “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” mempunyai strategi untuk memantapkan struktur organisasi dan tatalaksana lembaga, meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM aparatur, serta meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana yang memadai” dilandasi oleh penerapan prinsip Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yaitu :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja;
2. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan dengan Memperhatikan Penyandang Disabilitas;
3. Melakukan Standarisasi Bisnis Proses pada setiap Perangkat Daerah dan Mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan serta Meminta Respon Angket Langsung untuk Menuju Pelayanan Prima.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tahun 2023 - 2026.

Adapun Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja :

- 1) “Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja” mempunyai arah kebijakan untuk memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan Balai Latihan Kerja guna mencapai strategi peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja.

2. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan dengan Memperhatikan Penyandang Disabilitas :

- 1) “Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan dengan Memperhatikan Penyandang Disabilitas” mempunyai arah kebijakan untuk menyediakan, memfasilitasi dan memberikan kemudahan akses untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, khususnya penyandang disabilitas.

3. Melakukan Standarisasi Bisnis Proses pada setiap Perangkat Daerah dan Mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan serta Meminta Respon Angket Langsung untuk Menuju Pelayanan Prima :

- 1) “Melakukan Standarisasi Bisnis Proses pada setiap Perangkat Daerah dan Mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan serta Meminta Respon Angket Langsung untuk Menuju Pelayanan Prima” mempunyai arah kebijakan untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Untuk Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026

Visi : Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa							
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	1.	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	1.	Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Pelatihan Calon Tenaga Kerja	1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja
						2.	Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan dengan Memperhatikan Penyandang Disabilitas
Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa							
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Melakukan Standarisasi Bisnis Proses pada setiap Perangkat Daerah dan Mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan serta Meminta Respon Angket Langsung untuk Menuju Pelayanan Prima

Berdasarkan tabel 5.1 tersebut untuk mencapai visi dan misi pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan isu strategis tersebut maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan

1) Tujuan :

- Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

2) Sasaran :

- Mewujudkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas

3) Strategi :

- Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Pelatihan Calon Tenaga Kerja

4) Arah Kebijakan :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja;
- Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan dengan Memperhatikan Penyandang Disabilitas.

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

1) Tujuan :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah.

2) Sasaran :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

3) Strategi :

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4) Arah Kebijakan :

- Melakukan Standarisasi Bisnis Proses pada setiap Perangkat Daerah dan Mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan serta Meminta Respon Angket Langsung untuk Menuju Pelayanan Prima.

5.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut dilaksanakan Program Kegiatan melalui Bidang Teknis baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan Koordinasi intensif dalam penentuan sasaran target dilokasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian telah dilaksanakan dalam rangka untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) serta

meningkatkan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) di Provinsi Banten, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan maka capaian penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian masih belum maksimal dibandingkan dengan masih tingginya angka pengangguran, masih rendahnya tingkat partisipasi angkat kerja (TPAK) dan masih rendahnya indeks pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Banten.

Kondisi tersebut merupakan tantangan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik yang telah, sedang dan masih akan dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Tingginya angka pengangguran;
2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Pngkat Kerja (TPAK);
3. Rendahnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) yang terdiri dari beberapa indikator di antaranya sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Tenaga Kerja;
 - b. Penduduk dan Tenaga Kerja;
 - c. Pelatihan dan Kompetensi Kerja;
 - d. Produktivitas Tenaga Kerja;
 - e. Kesempatan Kerja;
 - f. Hubungan Industrial;
 - g. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
 - h. Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - i. Kondisi Lingkungan Kerja.

Berdasarkan tantangan tersebut, maka secara umum tantangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah bagaimana menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) serta meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) di Provinsi Banten.

Untuk mencapai tingkat pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tersebut, aspek yang dapat mendukung antara lain :

1. Adanya Peraturan Perundangan - Undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten :
 - a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
 - d. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
2. Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD maupun melalui dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) APBN;
3. Potensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional yang dimiliki yang dapat dioptimalkan peran dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang terdiri dari :
 - a. Pengantar Kerja;
 - b. Mediator;
 - c. Instruktur;
 - d. Pengawas ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026, terdapat beberapa permasalahan yang dapat menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja dimasa mendatang bila tidak segera ditangani secara terarah, terpadu dan berkesinambungan yang terdiri dari permasalahan tantangan organisasi Dinas dan faktor peluang, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2 Matriks Analisis SWOT (Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten)

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Internal Faktor</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Eksternal Faktor</p> </div> </div>	<p>Strenghts (S)</p>	<p>Weaknesses (W)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola sistem pemerintahan dengan prinsip <i>good governance</i>; • Kemampuan fiskal (PAD) cukup dalam merealisasikan program pemerintahan; • Potensi berbagai fasilitas yang tersedia di Provinsi Banten yang memadai; • Kemampuan daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Banten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Sumber Daya Manuasia (SDM) Ketenagakerjaan; • Belum Optimal Pembangunan dan pembangunan di UPTD Latihan Kerja; • Hanya Memiliki 1 (satu) UPTD Latihan Kerja; • Belum Maksimalnya Koordinasi antar bidang serta antar Perangkat Daerah terkait ketenagakerjaan.
<p>Opportunities (O)</p>	<p>Strategy S-O</p>	<p>Strategy W-O</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Industri atau perusahaan sebanyak 25.669 perusahaan; • Terdapat potensi wilayah untuk perluasan kesempatan kerja; • Terdapat Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik; • Peningkatan program/kegiatan dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi, baik di bidang pengawasan ketenagakerjaan, bidang penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan tenaga kerja, hubungan

<p>pelatihan Kerja (LPK) swasta yang dapat bekerjasama;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat lembaga pendidikan yang melaksanakan program vokasi dan bursa kerja khusus; • Terdapat Lembaga LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan untuk mendukung program Hubungan Industrial. 	<p>(TPAK) serta peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Banten;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan struktur organisasi dan tata laksana lembaga, kemampuan dan kapasitas SDM Aparatur dan daya dukung sarana prasarana dengan baik. 	<p>industrial dan pengupahan serta jaminan sosial ketenagakerjaan;;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan struktur organisasi dan tata laksana lembaga, kemampuan dan kapasitas SDM aparatur dan daya dukung sarana dan prasarana yang memadai; • Peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Threats (T)	Strategy S-T	Strategy W-T
<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sinergitas program/kegiatan lintas sektor, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat maupun stakholder yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelatihan dan kompetensi kerja; • Peningkatan produktivitas tenaga kerja; • Peningkatan kesempatan kerja; • Peningkatan hubungan industrial • Peningkatan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja; • Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja; • Peningkatan kondisi lingkungan kerja.

Faktor pendukung tersebut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang akan datang.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA
PENDANAAN

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan) hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026, yaitu : ” *Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan*”, maka program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang akan dilaksanakan setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023 – 2026 mencakup 6 (enam) Program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, dengan indikasi kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9) Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Latihan Kerja;
- 10) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Latihan Kerja;
- 11) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja;
- 12) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja;
- 13) Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang;
- 14) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang;
- 15) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang;
- 16) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang;
- 17) Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;

- 18) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- 19) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- 20) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- 21) Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang;
- 22) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang;
- 23) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang;
- 24) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang;
- 25) Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- 26) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- 27) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;

28) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan indikasi kegiatan :

1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikasi kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
- 2) Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- 3) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah;
- 4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi;
- 5) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi UPTD Latihan Kerja.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikasi kegiatan :

- 1) Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi.

5. Program Hubungan Industrial, dengan indikasi kegiatan :

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah;
- 3) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan indikasi kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran).

Tabel 6.1
Indikasi Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Latihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum pada UPTD Latihan Kerja
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Latihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Latihan Kerja
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Latihan Kerja

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja
			Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak

			<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak</p>	<p>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak</p>
			<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak</p>	<p>Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak</p>

			<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak</p>	<p>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada san Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak</p>
			<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang</p>	<p>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang</p>
			<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang</p>	<p>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang</p>

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja		
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja		
		Persentase Produktivitas Tenaga Kerja		
	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah			Persentase Ketercapaian Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah

	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi UPTD Latihan Kerja			Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi UPTD Latihan Kerja
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Kesempatan Kerja		
	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
5.	Program Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial		

		Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja		
		Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah

			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
6.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Kondisi Lingkungan Kerja		
			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

6.2. INDIKATOR KINERJA, KELEMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan dan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. Rencana program dan Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023 - 2026.

Mengacu pada gambaran data pelayanan OPD dan kajian isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya, rencana program kegiatan untuk 4 (empat) Tahun kedepan dapat dilihat pada pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yaitu pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun kedepan, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang mengaju pada tujuan dan sasaran 4 (empat) tahun mendatang pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Rencana Strategi yang memuat rencana dalam kurun waktu empat tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten telah memperhatikan permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.

Berdasarkan indikasi rencana program, kegiatan prioritas dan pendanaan yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja program dan capaian kinerja program dan kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 adalah :

Tabel 6.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Sasaran Daerah/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja/tujuan Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Sat.	Baseline	Target		Target		Target		Target		Rencana Lokasi	Bidang Urusan
						2021	2023		2024		2025		2026			
							Target	Pagu Indikatif (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah																
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			Nilai	Na	70-80	62,879,568,000	70-80	71,736,295,047	70-80	119,764,755,152	70-80	67,303,592,008	Provinsi Banten	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	Na	100	62,879,568,000	100	71,736,295,047	100	119,764,755,152	100	67,303,592,008	Provinsi Banten	

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	445,568,000	100	490,124,800	100	539,137,280	100	593,051,008	Provinsi Banten
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	2	129,542,000	2	142,496,200	2	156,745,820	2	172,420,402	Provinsi Banten
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten

			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	25,000,000	12	27,500,000	12	30,250,000	12	33,275,000	Provinsi Banten
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan	3	3	231,026,000	3	254,128,600	3	279,541,460	3	307,495,606	Provinsi Banten
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	42,234,000,000	100	44,353,200,000	100	46,579,110,000	100	48,917,141,000	Provinsi Banten

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/ Bulan	12	12	41,234,000,000	12	43,338,200,000	12	45,547,610,000	12	47,867,491,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	12	850,000,000	12	850,000,000	12	850,000,000	12	850,000,000	Provinsi Banten	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	

			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Dokumen	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	25,000,000	12	27,500,000	12	30,250,000	12	33,275,000	Provinsi Banten	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Dokumen	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	25,000,000	100	27,500,000	100	30,250,000	100	33,275,000	Provinsi Banten	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	300,000,000	100	330,000,000	100	363,000,000	100	399,300,000	Provinsi Banten	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	0	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Orang	5	5	50000000	5	55,000,000	5	60,500,000	5	66,550,000	Provinsi Banten	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Orang	0	174	100,000,000	174	110,000,000	174	121,000,000	174	133,100,000	Provinsi Banten	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	1,600,000,000	100	1,760,000,000	100	1,936,000,000	100	1,031,700,000	Provinsi Banten	

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	900,000,000	1	990,000,000	1	1,089,000,000	1	100,000,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Laporan	1	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	Provinsi Banten	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	Provinsi Banten	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	600,000,000	100	660,000,000	100	726,000,000	100	432,750,000	Provinsi Banten	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi Banten	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Provinsi Banten	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Paket)	Paket	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	Provinsi Banten	

			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	Provinsi Banten
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	350,000,000	1	385,000,000	1	423,500,000	1	100,000,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	6,175,000,000	100	6,792,500,000	100	7,471,750,000	100	6,266,025,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	900,000,000	1	990,000,000	1	1,089,000,000	1	900,000,000	Provinsi Banten

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	5,000,000,000	1	5,500,000,000	1	6,050,000,000	1	5,000,000,000	Provinsi Banten
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1,550,000,000	100	1,705,000,000	100	1,875,500,000	100	2,063,050,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	1	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	1	266,200,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	1	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	Provinsi Banten

			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	Unit	1	1	350,000,000	1	385,000,000	1	423,500,000	1	465,850,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	Unit	1	1	350,000,000	1	385,000,000	1	423,500,000	1	465,850,000	Provinsi Banten	

			Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Latihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum pada UPTD Latihan Kerja	Persen	100	100	290,000,000	100	319,000,000	100	350,900,000	100	385,990,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Laporan	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	Provinsi Banten
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Latihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Latihan Kerja	Persen	100	100	2,550,000,000	100	8,877,970,247	100	15,871,219,511	100	934,900,000	Provinsi Banten
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Paket)	Paket	1	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	Provinsi Banten

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	150,000,000	1	8,187,970,247	1	15,112,219,511	1	100,000,000	Provinsi Banten
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	2,000,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	Provinsi Banten
U			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Latihan Kerja	Persen	100	100	2,450,000,000	100	2,470,000,000	100	2,717,000,000	100	2,568,700,000	Provinsi Banten

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	250,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,200,000,000	1	2,000,000,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Latihan Kerja	Persen	100	100	2,800,000,000	100	1,905,000,000	100	39,054,288,361	100	1,202,050,000	Provinsi Banten	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	1	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	133,100,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	1,210,000,000	1	250,000,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	Provinsi Banten	

			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	Unit	1	1	1,000,000,000	1	100,000,000	6	37,068,788,361	1	110,000,000	Provinsi Banten
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	Unit	1	1	250,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	Provinsi Banten
			Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persen	100	100	125,000,000		137,500,000		151,250,000		166,375,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Laporan	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persen	100	100	30,000,000	100	33,000,000	100	36,300,000	100	39,930,000	Provinsi Banten	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persen	100	100	290,000,000	100	319,000,000	100	350,900,000	100	385,990,000	Provinsi Banten	

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	99,825,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang	Persen	100	100	20,000,000	100	22,000,000	100	24,200,000	100	26,620,000	Provinsi Banten	

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten
			Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Persen	100	100	125,000,000	100	137,500,000	100	151,250,000	100	166,375,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Laporan	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Persen	100	100	30,000,000	100	33,000,000	100	36,300,000	100	39,930,000	Provinsi Banten
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Persen	100	100	290,000,000	100	319,000,000	100	350,900,000	100	385,990,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	99,825,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten	

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada dan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Persen	100%	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	Provinsi Banten
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten

			Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Persen	100	100	125,000,000	100	137,500,000	100	151,250,000	100	166,375,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Laporan	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Persen	100	100	30,000,000	100	33,000,000	100	36,300,000	100	39,930,000	Provinsi Banten

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Persen	100	100	290,000,000	100	319,000,000	100	350,900,000	100	385,990,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	99,825,000	Provinsi Banten

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Persen	100%	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	Provinsi Banten
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten

			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten
			Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Persen	100	100	125,000,000	100	137,500,000	100	151,250,000	100	166,375,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Laporan	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	Provinsi Banten	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang	Persen	100	100	30,000,000	100	33,000,000	100	36,300,000	100	39,930,000	Provinsi Banten	

				dan Kota Tangerang Selatan												
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerj aan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerj aan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Persen	100	100	290,000,000	100	319,000,000	100	350,900,000	100	385,990,000	Provinsi Banten	

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	1	1	15,000,000	1	16,500,000	1	18,150,000	1	19,965,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	75,000,000	1	82,500,000	1	90,750,000	1	99,825,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang	Persen	100%	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	Provinsi Banten	

				dan Kota Tangerang Selatan												
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	Provinsi Banten	
Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan																
Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			Nilai	52.84	68.26	21,500,169,000	71.85	23,181,318,953	74.25	22,534,450,848	76.04	23,678,791,992	Provinsi Banten	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	Persen	6.95	8.70	225,169,000	8.80	247,685,900	9.00	272,454,490	9.20	274,566,992	Provinsi Banten	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persen	Na	100	225,169,000	100	247,685,900	100	272,454,490	100	274,566,992	Provinsi Banten	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro (Orang)	Orang	Na	50	225,169,000	55	247,685,900	61	272,454,490	67	274,566,992	Provinsi Banten	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Persen	2.27	6.64	10,500,000,000	9.12	11,550,000,000	10.13	11,770,000,000	10.24	12,645,500,000	Provinsi Banten	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	5.02	4.96	500,000,000	5.06	550,000,000	5.16	605,000,000	5.26	665,500,000	Provinsi Banten	

			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persen	Na	100	1,500,000,000	100	1,650,000,000	100	1,815,000,000	100	2,165,500,000	Provinsi Banten
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	Orang	Na	906	1,000,000,000	997	1,100,000,000	1,097	1,210,000,000	906	1,500,000,000	Provinsi Banten
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	Lembaga	Na	8	500,000,000	8	550,000,000	8	605,000,000	8	665,500,000	Provinsi Banten
			Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Dokumen	Na	100	500,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	300,000,000	Provinsi Banten

			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK)	LPK	113	124	500,000,000	137	550,000,000	137	550,000,000	100	300,000,000	Provinsi Banten
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Dokumen	Na	100	250,000,000	100	275,000,000	100	302,500,000	100	332,750,000	Provinsi Banten
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	Perusahaan	100	110	250,000,000	121	275,000,000	133	302,500,000	146	332,750,000	Provinsi Banten
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Na	100	250,000,000	100	275,000,000	100	302,500,000	100	332,750,000	Provinsi Banten
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah (Dokumen)	Dokumen	1	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	332,750,000	Provinsi Banten

			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi UPTD Latihan Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi UPTD Latihan Kerja	Persen	Na	100	8,500,000,000	100	9,350,000,000	100	9,405,000,000	100	10,180,000,000	Provinsi Banten	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	Orang	512	1,000	8,000,000,000	1,100	8,800,000,000	1,100	8,800,000,000	900	9,680,000,000	Provinsi Banten	
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	Lembaga	1	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	500,000,000	Provinsi Banten	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Kesempatan Kerja	Persen	11.40	13.61	4,975,000,000	13.86	5,142,500,000	14.19	3,776,750,000	14.59	3,813,925,000	Provinsi Banten	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Na	100	2,275,000,000	100	2,352,500,000	100	1,687,750,000	100	1,616,025,000	Provinsi Banten
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Orang	Na	3	25,000,000	3	27,500,000	3	30,250,000	3	33,275,000	Provinsi Banten
			Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Orang)	Orang	Na	110	250,000,000	121	275,000,000	133	302,500,000	110	250,000,000	Provinsi Banten
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	Orang	Na	110	250,000,000	121	275,000,000	133	302,500,000	110	250,000,000	Provinsi Banten
			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Orang)	Orang	Na	110	250,000,000	121	275,000,000	133	302,500,000	110	332,750,000	Provinsi Banten

			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	Orang	Na	500	1,500,000,000	500	1,500,000,000	250	750,000,000	250	750,000,000	Provinsi Banten
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persen	Na	100	2,200,000,000	100	2,240,000,000	100	1,484,000,000	100	1,532,400,000	Provinsi Banten
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	Dokumen	Na	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Orang)	Orang	Na	1,000	250,000,000	1,000	275,000,000	1,000	302,500,000	1,000	332,750,000	Provinsi Banten
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	Orang	Na	20,000	1,800,000,000	20,000	1,800,000,000	10,000	1,000,000,000	10,000	1,000,000,000	Provinsi Banten

			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persen	Na	100	500,000,000	100	550,000,000	100	605,000,000	100	665,500,000	Provinsi Banten	
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Orang	Na	100	250,000,000	110	275,000,000	121	302,500,000	133	332,750,000	Provinsi Banten	
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	Orang	Na	100	250,000,000	110	275,000,000	121	302,500,000	133	332,750,000	Provinsi Banten	
			Program Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial	Persen	2.41	4.19	1,600,000,000	4.48	1,760,000,000	4.65	1,936,000,000	4.77	2,129,600,000	Provinsi Banten	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamina n Sosial Tenaga Kerja
				Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Persen	10.00	10.00	700,000,000	10.00	770,000,000	10.00	847,000,000	10.00	931,700,000	Provinsi Banten	

				Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	10.00	10.00	500,000,000	10.00	550,000,000	10.00	605,000,000	10.00	665,500,000	Provinsi Banten	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persen	Na	100	450,000,000	100	495,000,000	100	544,500,000	100	598,950,000	Provinsi Banten	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	Perusahaan	Na	100	150,000,000	110	165,000,000	121	181,500,000	133	199,650,000	Provinsi Banten	
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online (Perusahaan)	Perusahaan	Na	100	150,000,000	110	165,000,000	121	181,500,000	133	199,650,000	Provinsi Banten	

			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKE, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan)	Laporan	Na	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	199,650,000	Provinsi Banten
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Persen	Na	100	1,150,000,000	100	1,265,000,000	100	1,391,500,000	100	1,530,650,000	Provinsi Banten
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	Perkara	Na	10	100,000,000	15	110,000,000	20	121,000,000	25	133,100,000	Provinsi Banten

			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	Perkara	Na	10	100,000,000	15	110,000,000	20	121,000,000	25	133,100,000	Provinsi Banten
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	Asosiasi dan Serikat Pekerja	Na	100	100,000,000	110	110,000,000	121	121,000,000	133	133,100,000	Provinsi Banten
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	Lembaga	Na	8	700,000,000	8	770,000,000	8	847,000,000	8	931,700,000	Provinsi Banten
			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi (Perusahaan)	Perusahaan	Na	100	150,000,000	110	165,000,000	121	181,500,000	133	199,650,000	Provinsi Banten

			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persen	Na	100	1,200,000,000	100	1,320,000,000	100	1,452,000,000	100	1,597,200,000	Provinsi Banten	
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	Surat Keputusan	Na	1	700,000,000	1	770,000,000	1	847,000,000	1	931,700,000	Provinsi Banten	
			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah Penetapan UMK (Surat Keputusan)	Surat Keputusan	Na	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	Provinsi Banten	
			Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Kondisi Lingkungan Kerja	Persen	0.90	3.53	2,500,000,000	3.79	2,611,133,053	4.27	2,722,246,358	5.01	2,552,500,000	Provinsi Banten	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persen	Na	100	2,500,000,000	100	2,611,133,053	100	2,722,246,358	100	2,552,500,000	Provinsi Banten
			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	Perusahaan	Na	1000	1,500,000,000	1000	1,500,000,000	1000	1,500,000,000	1000	1,500,000,000	Provinsi Banten
			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	Kasus	Na	3	250,000,000	5	275,000,000	7	302,500,000	9	302,500,000	Provinsi Banten
			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	Perusahaan	Na	750	750,000,000	800	836,133,053	850	919,746,358	750	750,000,000	Provinsi Banten
								84,379,737,000		94,917,614,000		142,299,206,000		90,982,384,000	

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten,** dengan indikator Program :
 - Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan target 100 persen.
- 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja,** dengan indikator Program :
 - Persentase Perencanaan Tenaga Kerja, dengan target 9,20 persen.
- 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,** dengan indikator Program :
 - Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja, dengan target 10,24 persen;
 - Persentase Produktivitas Tenaga Kerja, dengan target 5,26 persen.
- 4. Program Penempatan Tenaga Kerja,** dengan indikator Program :
 - Persentase Kesempatan Kerja, dengan target 14,59 persen.
- 5. Program Hubungan Industrial,** dengan indikator Program :
 - Persentase Hubungan Industrial, dengan target 4,77 persen;
 - Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, dengan target 10 persen;
 - Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan target 10 persen.
- 6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan,** dengan indikator Program :
 - Persentase Kondisi Lingkungan Kerja, dengan target 5,01 persen.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

7.1. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat menggunakan formula yang disajikan dalam Tabel Lampiran Ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh Pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Kabupaten/Kota, pada setiap Kecamatan di wilayah masing-masing.

Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau menyeleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rumus aspek Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (Outcome) dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan tenaga kerja dengan tingkat sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Aspek dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran
(dampak/impact) Pemerintah Daerah Tahun 2023 – 2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJPD	Target Capaian				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1.	Aspek Pelayanan Umum							
1.1	Fokus Administrasi Pemerintahan							
1.1.1	Administrasi Pemerintahan							
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80
2.	Aspek Pelayanan Umum							
2.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
2.1.1	Tenaga Kerja							
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	Nilai	52,84	68,26	71,85	74,25	76,04	76,04

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang telah ditetapkan maka rumusan target indikator kinerja sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon tujuan dan sasaran serta prospek pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada 2023 - 2026. Adapun target indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dalam Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Kinerja sasaran adalah Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).

7.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten 2023-2026. Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD maka indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten mengacu pada Misi Kebijakan Umum Pembangunan Daerah yang tercantum dalam 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Berdasarkan pada 4 (empat) Misi tersebut, maka misi yang harus diusung dalam pelaksanaan Tugas Pokok pada periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 adalah :

Misi :

- Misi ke 2 (dua), Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- Misi ke 4 (empat), Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Tujuan :

- Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan;
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah.

Sasaran :

- Mewujudkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas;
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Banten selama periode 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Indeks pembangunan Ketenagakerjaan (IPK);

- Persentase Perencanaan Tenaga Kerja;
- Persentasi Penduduk dan Tenaga Kerja;
- Persentase Pelatihan dan Kompetensi;
- Persentase Produktivitas Tenaga Kerja;
- Persentase Kesempatan Kerja;
- Persentase Hubungan Industrial;
- Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
- Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- Persentase Kondisi Lingkungan Hidup.
- 2. Capaian SAKIP pada Perangkat Daerah.**
- Perencanaan Kinerja;
 - Pengukuran Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja;
 - Evaluasi Kinerja;
 - Capaian Kinerja.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja	KEPALA DINAS
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi	KEPALA DINAS

Berdasarkan table 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- Indeks Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).

2. Definisi Operasional :

- Suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan yang mencakup 9 (Sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, pelatihan kerja dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja, hubungan industrial, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja dan kondisi lingkungan kerja.

3. Penanggung Jawab :

- **Kepala Dinas**

1. Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- Capaian SAKIP pada Perangkat Daerah.

2. Definisi Operasional :

- Untuk Mendorong perangkat daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanatkan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

3. Penanggung Jawab :

- Kepala Dinas

Adapun target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 7.3
Target Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE -			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	68,26 Persen	71,85 Persen	74,25 Persen	76,04 Persen
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70-80 Nilai	70-80 Nilai	70-80 Nilai	70-80 Nilai

Berdasarkan tabel 7.3 tersebut untuk mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 dilaksanakan dengan penetapan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan :

1) Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas :

- **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)**, dengan target sasaran kinerja pada tahun 2023 sejumlah 68,26 persen, tahun 2024 sejumlah 71,85 persen, tahun 2025 sejumlah 74,25 persen dan tahun 2026 sejumlah 76,04 persen.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- Capaian SAKIP Perangkat Daerah, dengan target sasaran kinerja tahun 2023 sejumlah 70-80 nilai, tahun 2024 sejumlah 70-80 nilai, tahun 2025 sejumlah 70-80 nilai dan tahun 2026 sejumlah 70-80 nilai.

Berdasarkan rumusan indikator program (Outcome) dari Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dan Capaian SAKIP pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

NO	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan			
		Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	Indikator utama perencanaan tenaga kerja terdiri dari 1 (satu) subindikator yaitu Indeks subindikator PTKP/PTKK	Sekretaris Dinas
		Persentase Penduduk dan Tenaga Kerja	Indikator utama penduduk dan tenaga kerja terdiri dari 4 (empat) sub-indicator yaitu NEET, persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, TPT dan STP	Sekretaris Dinas
		Persentase Kesempatan Kerja	Indikator utama kesempatan kerja, terdiri dari 5 (lima) subindikator yaitu persentase Tenaga Kerja Formal, LPINP, LPINP bagi Laki-laki, LPINP bagi Perempuan dan LPIP	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Indikator utama Pelatihan Kerja dan Kompetensi Kerja terdiri dari 3 (tiga) subindikator yaitu tingkat kapasitas Pelatihan Kerja, tingkat lulusan Pelatihan Kerja dan tingkat lembaga pelatihan yang terakreditasi	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Persentase Produktivitas	Indikator utama produktivitas tenaga kerja, terdiri dari 2 (dua) subindikator yaitu produktivitas Tenaga Kerja dan tingkat laju	Kepala Bidang Pelatihan dan

		Tenaga Kerja	pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja
		Persentase Hubungan Industrial	Indikator utama Hubungan Industrial terdiri dari 4 (empat) subindikator yaitu tingkat Peraturan Perusahaan yang Disahkan, tingkat Perjanjian Kerja Bersama yang Didaftarkan, Indeks subindikator tingkat LKS Bipartit di Perusahaan dan Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Indikator utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri dari 1 (satu) subindikator yaitu Proporsi Upah Rata-rata per Jam terhadap UMP per Jam	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Indikator utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari 2 (dua) subindikator yaitu Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Anggota BPJS dan Tingkat Penduduk Yang Bekerja Terdaftar Sebagai Anggota BPJS Ketenagakerjaan Aktif	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Persentase Kondisi Lingkungan Kerja	Indikator utama kondisi lingkungan kerja, terdiri dari 3 (tiga) subindikator yaitu Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan, Tingkat Kecelakaan Kerja dan Tingkat Kepatuhan Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
2.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu	Sekretaris Dinas

Berdasarkan table 7.4 indikator program (Outcome) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai berikut :

IKU : Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan :

1. Indikator Program (Outcome) :

- Persentase Perencanaan Tenaga Kerja

Definisi Operasional :

- Indikator utama perencanaan tenaga kerja terdiri dari 1 (satu) subindikator yaitu Indeks subindikator PTKP/PTKK

Penanggung Jawab :

- Sekretaris Dinas

2. Indikator Program (Outcome) :

- Persentase Penduduk dan Tenaga Kerja

Definisi Operasional :

- Indikator utama penduduk dan tenaga kerja terdiri dari 4 (empat) sub- indicator yaitu NEET, persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, TPT dan STP

Penanggung Jawab :

- Sekretaris Dinas

3. Indikator Program (Outcome) :

- Persentase Kesempatan Kerja

Definisi Operasional :

- Indikator utama kesempatan kerja, terdiri dari 5 (lima) subindikator yaitu persentase Tenaga Kerja Formal, LPINP, LPINP bagi Laki-laki, LPINP bagi Perempuan dan LPIP

Penanggung Jawab :

- Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Indikator Program (Outcome) :

- Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja

Definisi Operasional :

- Indikator utama Pelatihan Kerja dan Kompetensi Kerja terdiri dari 3 (tiga) subindikator yaitu tingkat kapasitas Pelatihan Kerja, tingkat lulusan Pelatihan Kerja dan tingkat lembaga pelatihan yang terakreditasi

Penanggung Jawab :

- Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

5. Indikator Program (Outcome) :

- Persentase Produktivitas Tenaga Kerja

Definisi Operasional :

- Indikator utama produktivitas tenaga kerja, terdiri dari 2 (dua) subindikator yaitu produktivitas Tenaga Kerja dan tingkat laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Penanggung Jawab :

- Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

6. Indikator Program (Outcome) :

- Persentase Hubungan Industrial

Definisi Operasional :

- Indikator utama Hubungan Industrial terdiri dari 4 (empat) subindikator yaitu tingkat Peraturan Perusahaan yang Disahkan, tingkat Perjanjian Kerja Bersama yang Didaftarkan, Indeks subindikator tingkat LKS Bipartit di Perusahaan dan Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial

Penanggung Jawab :

- Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

7. Indikator Program (Outcome) :

- Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja

Definisi Operasional :

- Indikator utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri dari 1 (satu) subindikator yaitu Proporsi Upah Rata-rata per Jam terhadap UMP per Jam

Penanggung Jawab :

- Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

8. Indikator Program (Outcome) :

- Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Definisi Operasional :

- Indikator utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari 2 (dua) subindikator yaitu Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Anggota BPJS dan Tingkat Penduduk Yang Bekerja Terdaftar Sebagai Anggota BPJS Ketenagakerjaan Aktif

Penanggung Jawab :

- Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

9. Indikator Program (Outcome) :

- Persentase Kondisi Lingkungan Kerja

Definisi Operasional :

- Indikator utama kondisi lingkungan kerja, terdiri dari 3 (tiga) subindikator yaitu Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan, Tingkat Kecelakaan Kerja dan Tingkat Kepatuhan Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan

Penanggung Jawab :

- Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

IKU : Capaian SAKIP pada perangkat Daerah :

1. Indikator Program (Outcome) :

- Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Definisi Operasional :

- Indikator utama ini untuk memastikan ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Penanggung Jawab :

- Sekretaris Dinas

Adapun target indikator kinerja program (Outcome) pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 7.5
Target Berdasarkan Indikator Kinerja Program (Outcome) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

NO	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	Indikator utama perencanaan tenaga kerja terdiri dari 1 (satu) subindikator yaitu Indeks subindikator PTKP/PTKK	8,70 Persen	8,80 Persen	9,00 Persen	9,20 Persen
		Persentase Penduduk dan Tenaga Kerja	Indikator utama penduduk dan tenaga kerja terdiri dari 4 (empat) sub-indicator yaitu NEET, persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, TPT dan STP	6,63 Persen	6,75 Persen	6,85 Persen	6,97 Persen
		Persentase Kesempatan Kerja	Indikator utama kesempatan kerja, terdiri dari 5 (lima) subindikator yaitu persentase Tenaga Kerja Formal, LPINP, LPINP bagi Laki-laki, LPINP bagi Perempuan dan LPIP	13,61 Persen	13,86 Persen	14,19 Persen	14,59 Persen
		Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Indikator utama Pelatihan Kerja dan Kompetensi Kerja terdiri dari 3 (tiga) subindikator yaitu tingkat kapasitas Pelatihan Kerja, tingkat lulusan Pelatihan Kerja dan tingkat lembaga pelatihan yang terakreditasi	6,64 Persen	9,12 Persen	10,13 Persen	10,24 Persen

	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator utama produktivitas tenaga kerja, terdiri dari 2 (dua) subindikator yaitu produktivitas Tenaga Kerja dan tingkat laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	4,96 Persen	5,06 Persen	5,16 Persen	5,26 Persen
	Persentase Hubungan Industrial	Indikator utama Hubungan Industrial terdiri dari 4 (empat) subindikator yaitu tingkat Peraturan Perusahaan yang Disahkan, tingkat Perjanjian Kerja Bersama yang Didaftarkan, Indeks subindikator tingkat LKS Bipartit di Perusahaan dan Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	4,19 Persen	4,48 Persen	4,65 Persen	4,77 Persen
	Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Indikator utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri dari 1 (satu) subindikator yaitu Proporsi Upah Rata-rata per Jam terhadap UMP per Jam	10,00 Persen	10,00 Persen	10,00 Persen	10,00 Persen
	Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Indikator utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari 2 (dua) subindikator yaitu Tingkat Perusahaan Yang Menjadi Anggota BPJS dan Tingkat Penduduk Yang Bekerja Terdaftar Sebagai Anggota BPJS Ketenagakerjaan Aktif	10,00 Persen	10,00 Persen	10,00 Persen	10,00 Persen
	Persentase Kondisi Lingkungan Kerja	Indikator utama kondisi lingkungan kerja, terdiri dari 3 (tiga) subindikator yaitu Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan, Tingkat Kecelakaan Kerja dan Tingkat Kepatuhan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan	3,53 Persen	3,79 Persen	4,27 Persen	5,01 Persen

2.	Capaian SAKIP pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indikator utama ini untuk memastikan ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	70-80 (Nilai)	70-80 (Nilai)	70-80 (Nilai)	70-80 (Nilai)
----	-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Tabel 7.6
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
Tahun 2023 – 2026

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Sat.	Baseline	Target	Target	Target	Target	Kondisi Kinerja pada Akhir RPD
				2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capaian SAKIP pada Perangkat Daerah			Nilai	Na	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	Na	100	100	100	100	100
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)			Nilai	52.84	68.26	71.85	74.25	76.04	76.04
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	Persen	6.95	8.70	8.80	9.00	9.20	9.20
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Persen	2.27	6.64	9.12	10.13	10.24	10.24
		Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	5.02	4.96	5.06	5.16	5.26	5.26
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Kesempatan Kerja	Persen	11.40	13.61	13.86	14.19	14.59	14.59
	Program Hubungan Industrial	Persentase Hubungan Industrial	Persen	2.41	4.19	4.48	4.65	4.77	4.77
		Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	Persen	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Kondisi Lingkungan Kerja	Persen	0.90	3.53	3.79	4.27	5.01	5.01

BAB VIII

PENUTUP

8.1. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (empat tahunan) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026.

Pada periode tahun 2023 - 2026, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menggambarkan prioritas penanganan yang perlu dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka penentuan isu - isu strategis : (3) Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja; (4) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan.

Selanjutnya, dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan isu strategis tersebut, untuk mencapai Misi Provinsi Banten (Misi ke - 2 dan 4), yaitu : *“Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan” dan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa”*. Maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 ditetapkan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran yang akan ditempuh melalui 2 (dua) Strategi yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Arah Kebijakan 6 (enam) Program serta 41 (empat puluh satu) Indikasi Kegiatan.

Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selama periode 2023 - 2026.

Pada akhirnya diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 -2026 ini penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal. Sehingga terwujudnya suatu kondisi yang dicita - citakan yakni untuk mewujudkan penurunan angka pengangguran, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) di Provinsi Banten dalam rangka mencapai visi Provinsi Banten yaitu : *“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa“*.

Serang, Maret 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten

H. AL HAMIDI, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640817 198603 1 022

BAB VIII

PENUTUP

8.1. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (empat tahunan) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026.

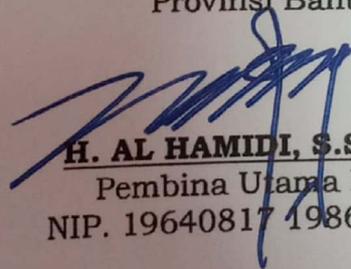
Pada periode tahun 2023 - 2026, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menggambarkan prioritas penanganan yang perlu dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka penentuan isu - isu strategis : (3) Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja; (4) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan.

Selanjutnya, dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan isu strategis tersebut, untuk mencapai Misi Provinsi Banten (Misi ke - 2 dan 4), yaitu : *"Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan"* dan *"Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa"*. Maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 ditetapkan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran yang akan ditempuh melalui 2 (dua) Strategi yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Arah Kebijakan 6 (enam) Program serta 41 (empat puluh satu) Indikasi Kegiatan.

Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selama periode 2023 - 2026.

Pada akhirnya diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2023 -2026 ini penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal. Sehingga terwujudnya suatu kondisi yang dicita - citakan yakni untuk mewujudkan penurunan angka pengangguran, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) di Provinsi Banten dalam rangka mencapai visi Provinsi Banten yaitu : *"Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"*.

Serang, Maret 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten



H. AL HAMIDI, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640817 198603 1 022